

Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam

Mr. Ilham Nuereng

IKA-Siyasah Yogyakarta. Email: ham_7200@hotmail.com

Abstrak: Negara Thailand merupakan negara yang berbentuk kesatuan dengan mayoritas penduduk beragama Budha dan hanya sedikit yang beragama Islam. Masyarakat muslim Thailand terkonsentrasi di wilayah Thailand Selatan di antaranya Pattani, Narathiwat dan Yala. Muslim melayu di Thailand Selatan memiliki perbedaan yang mencolok secara sosio-kultural dibandingkan dengan penduduk mayoritas Negara Thailand yaitu Budha. Sejarah mengenai Thailand Selatan tidak terlepas dari sejarah konflik yang berkepanjangan antara masyarakat muslim melayu, Budha dan pemerintah Thailand sendiri. Salah satu isu yang dibangun dari konflik tersebut tidak lain adalah isu rasialisme. Implikasi dari masalah ini adalah munculnya gerakan- gerakan separatis dari kedua belah pihak. Sampai saat ini konflik Thailand Selatan masih berlangsung dan belum menemukan titik temu perdamaian. Dari kompleksitas konflik tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah ; pertama, apa faktor penyebab konflik di Thailand Selatan, dan kedua, Bagaimana upaya pemerintah dalam meredam konflik di Thailand Selatan. Penelitian ini menemukan bahwa terjadinya konflik di Thailand Selatan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, faktor historis, faktor agama, faktor sosial, dan faktor politik. Dari kompleksitas konflik tersebut, pemerintah Thailand melakukan beberapa upaya dalam meredam konflik diantaranya; pertama, upaya internal dengan membentuk Komisi Rekonsiliasi Nasional dan Undang-Undang darurat. Kedua, upaya eksternal yaitu dengan melakukan kesepakatan damai yang melibatkan beberapa negara diantaranya Malaysia dan Indonesia sebagai mediator.

Kata Kunci: *Thailand Selatan, Konflik, dan Rekonsiliasi.*

Pendahuluan

Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak terkena kolonialisme Barat. Thailand sering disebut juga *Muang-thai*, *Siam* atau negara Gajah Putih. Disebut *Muang-thai* karena mengambil nama salah satu suku

bangsa di sana yaitu suku bangsa Thai. Disebut Thailand artinya bebas atau merdeka, negara ini memang tidak pernah dijajah oleh negara lain¹.

Jenis kekuasaan Thailand adalah Monarki Konstitusional. Kendati Monarki Konstitusional, Thailand menganut trias politika yang mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sepanjang 1932 - 2006, Thailand sekurang-kurangnya punya 16 macam konstitusi. Monarki Absolut Thailand dihapus sejak tahun 10 Desember 1932. Monarki Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun, Monarki tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan sehari-hari. Ada Dewan Negara Thailand, beranggota 18 orang yang diangkat Monarki, yang fungsinya memberi nasehat berdasarkan permintaan Monarki. Menteri-menteri dalam kabinet Thailand diangkat oleh Monarki tetapi bertanggung jawab kepada Parlemen. Bentuk Negara Kesatuan Thailand dibagi kedalam 77 provinsi. Setiap provinsi dipimpin gubernur. Gubernur adalah PNS - PNS karir yang diangkat oleh Mendagri, kecuali Gubernur Bangkok yang dipilih rakyat. Sistem pemerintahan parlementer, Raja sebagai kepala negara, Perdana Menteri sebagai kepala Administratif Pemerintahan. Jenis Parlemennya adalah Bikameral (Dewan perwakilan Rakyat dan Senat).

Dewan Perwakilan Rakyat dan senat merupakan unsur parlemen Thailand. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas 500 anggota untuk masa jabatan 4 tahun. 100 orang dipilih lewat sistem proposional dengan varian Party List (dari parpol), sementara 400 dengan sistem mayoritas dengan Varian First-Past-The Post (dari parpol). Fungsi utamanya menginisiasi dan memberi persetujuan RUU, merancang anggaran, memilih Perdana Menteri dari anggota parlemen, memberhentikan menteri, memonitor administrasi negara, serta bersama senat memutuskan masalah-masalah substansial negara seperti masalah konstitusi, prosedur pemerintahan yang penting,

¹ <http://profil-sejarah.blogspot.co.id>, diakses tanggal 02 Februari 2016.

deklarasi perang dan damai, meratifikasi perjanjian internasional. Uniknya, untuk menginisiasi mosi tidak percaya kepada perdana menteri, cukup dilakukan lewat 1/5 dukungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di sisi lain, senat terdiri atas 200 anggota yang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Seluruh anggota Senat dipilih lewat pemilu dengan sistem mayoritas dengan varian single vote dan boleh berasal dari luar parpol.

Thailand memiliki luas 510.000 kilometer atau seukuran dengan negara Perancis. Jumlah penduduk adalah 67.741.401 jiwa. sebagian besar (82%) adalah orang Thai-Budha, sisanya adalah orang-orang Cina, India, dan Melayu. Mereka berbahasa Thai dengan sebagian besar (93%).

Penduduknya mayoritas beragama Budha. hanya sedikit yang beragama Islam. Wilayah Thailand Selatan khususnya tiga provinsi (Pattani, Narathiwat dan Yala) dalam sensus menetapkan populasi muslim Melayu di tiga provinsi Selatan penduduk adalah 1.673.900 jiwa, memiliki perbedaan besar secara sosial budaya jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah Thailand yang lain. Jika wilayah-wilayah yang lain didominasi oleh etnis Thai yang beragama budha, maka wilayah Thailand Selatan mayoritas penduduknya adalah etnis Melayu yang memeluk agama Islam.

Thailand Selatan mempunyai identitas sejarah kenegaraan, keagamaan dan kebudayaan tersendiri terdiri dari provinsi Pattani, Narathiwat, dan Yala. Provinsi-provinsi selatan bagian bawah dikenal dengan (tiga wilayah sempadan selatan), kedudukannya secara umum merupakan daerah kekuasaan politik yang mempunyai latar belakang sejarah kedaulatan.

Dalam catatan sejarah sebelum negeri Patani Darussalam jatuh ke tangan pemerintahan Thailand pada tahun 1902², Negeri Patani Darussalam memiliki sejarah yang cukup lama, jauh lebih lama dari pada sejarah negeri-negeri Melayu

² Ahmad Fathy al-Fatani, *Pengantar Sejarah Patani*, (Khotabaru, Kelantan: Pustaka Darussalam, 1994), hlm. 53.

lainnya di Semenanjung.³ Negeri Patani Darussalam seperti juga negeri-negeri Melayu di Nusantara yang mempunyai kerajaan yang pernah berdiri, diperintah oleh kesultanan Islam Melayu. Negeri Patani Darussalam terkenal dengan pusat pelabuhan di sekitar Laut Cina Selatan. Kemakmurannya menyebabkan negara pelabuhan maritim ini menjadi incaran oleh musuh bangsa Melayu, yaitu *Siam* (Thailand) yang seringkali memberikan ancaman terhadap negeri-negeri Melayu.⁴

Kedudukan Negeri Patani Darussalam di Semenanjung Melayu sangat strategis ditinjau dari segi geografisnya, Negeri Patani Darussalam telah berdiri menjadi sebuah kerajaan Melayu yang terpenting dari segi pemikiran keagamaan, pendidikan Islam, ekonomi serta kestabilan politik dan pemerintahannya.

Sejarah Islam di Patani tidak pernah lepas dari konflik, terutama setelah wilayah Patani tersebut, dikuasai oleh penguasa Thailand dan pelaksanaan program-programnya, yang bermaksud mengubah simbol-simbol unik, yaitu agama Islam, budaya dan pendidikan Melayu Patani, yang membedakannya dengan seluruh etnis penduduk di negara Thai-budha. Berulang-kali terjadi protes dan perlawanan bersenjata, melawan penguasa Thailand, yang mencoba menghilangkan atau menggeser simbol-simbol tersebut.

Tokoh-tokoh muda Melayu Patani kini mulai lebih canggih dalam mengorganisasikan dan menyusun strategi gerakan. Demikian juga dalam mengekspresikan bahasa perjuangan. Mereka berbicara "dalam bahasa politik yang sama"

³ Kerajaan Patani dalam penulisan ini bukan dimaksudkan dengan *Changwad* (propinsi) seperti sekarang, sebagaimana yang wujudnya dalam peta geografis Muang Thai, tetapi adalah merujuk kepada sebuah kerajaan Islam Melayu. Secara geografis negeri Patani Darussalam yang dulunya mulai dari kawasan Changwad Pattani, Yala, Narathiwat dan sebagian dari Songkla. Lihat Cilive J. Christie, *A Modern History of Southeast Asia: decolonization nationalism and separatism*, (Singapore, Tuaris Academic Studies IB Tuaris Publishers London: New York Institute of Southeast Asian Studies, 1996), hlm.173.

⁴ Mohd. Zambari A. Malek, *Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik*, (Shah Alam: Hizbi, 1993), hlm. 4.

dengan bahasa politik pemerintah Thailand. Berbagai tuntutan dan proses kini didasarkan atas asas-asas yang diserukan pemerintah Thailand sendiri, yakni kebebasan, persamaan, dan jaminan hak-hak politik bagi semua warga negara tanpa memandang asal-usul ras dan etnis. Dalam forum-forum internasional, masalah yang menyangkut status hukum etnis Melayu Patani di Thailand Selatan ini semakin mendapat perhatian. Etnis Melayu Patani ini kini telah mempunyai wakil-wakil dalam pertemuan-pertemuan seperti Konferensi Liga Dunia Asia, dan Konferensi Liga Arab.

Kalau masa-masa sebelumnya tuntutan masyarakat Melayu Patani kepada pemerintah Thailand hanya terbatas pada otonomi dalam urusan keagamaan, budaya dan hukum, mulai sekitar pertengahan 1970 an, tuntutan itu berubah, yaitu suatu pemerintahan yang otonom. Dalam memperjuangkan cita-cita ini, ternyata di kalangan masyarakat Melayu Patani terdapat perbedaan dalam orientasi ideologi, taktik dan ruang lingkup operasi perjuangan. Perbedaan inilah yang menyebabkan gerakan separatis terbagi ke dalam tiga kelompok utama, yang masing-masing memiliki struktur kepemimpinan dan keanggotaan dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, organisasi-organisasi separatis ini menuntut kemerdekaan penuh bagi Patani.⁵ Antara gerakan utama yang ditubuhkan ialah Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP), Barisan Revolusi Nasional (BRN) dan *Pattani United Liberation Organisation* (PULO). Pemberontakan untuk pemisahan ini dilaksanakan kerana merasakan bumi mereka dijajah, identitas mereka diasimilasi, agama mereka dicabuli, bangsa mereka di diskriminasi dan hasil bumi mereka diselenggara oleh kerajaan Thailand Bangkok, Ancaman yang paling serius terhadap pemerintah Thailand adalah gerakan-gerakan separatis di provinsi Pattani, Narathiwat dan Yala. Secara khas, gerakan separatis di wilayah ini terombang-ambing antara tuntutan untuk memerintah sendiri dan pemisahan total.⁶ Sampai hari ini

⁵ Dedi Supriadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 212.

⁶ Taufik abdullah dan sharon Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di*

konflik masih tetap berlanjut di wilayah Thailand Selatan.

Upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam dua belas tahun dengan terbentuknya komisi rekonsiliasi nasional yang mengantarkan dan memediasi perdamaian dan dengan kebijakan pendekatan undang-undang darurat yang mempunyai kewenangan bagi pemerintah pusat mengarahkan kekuatan militer menangani konflik di Thailand Selatan. Kuatnya peran militer di Thailand, membuat banyak rekomendasi komisi tidak bisa di jalankan. Pendidikan, pekerjaan dan fasilitas pemerintah lainnya tetap saja tidak leluasa dinikmati bagi masyarakat Melayu Patani. Persyaratan pemakaian ketat bahasa nasional Thai dan sikap yang mencerminkan nasionalisme pro kebijakan pusat menjadi penghambat rekonsiliasi yang telah dilakukan baik oleh lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan komisi rekonsiliasi.⁷

Berbagai upaya perdamaian telah di tawarkan namun belum ada yang membuahkan hasil yang signifikan. Terlebih setelah pemerintah memberlakukan undang-undang darurat di mana memberikan kewenangan yang terlampau besar pada militer. Wewenang ini menjadikan militer angkuh dan ringan tangan untuk melepaskan peluru pada masyarakat Melayu Patani yang memang menjadi obyek sasaran, sehingga jumlah korban akibat dari kebijakan ini meningkat signifikan. masyarakat Thailand Selatan tak kalah brutal.

Konflik ini menjadi semakin kompleks dengan melibatkan banyak sumber konflik politik, ekonomi, etnis, dan agama yang sampai sekarang belum ketemu benang merahnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dengan mengurai persoalannya agar dapat gambaran lebih jelas mengenai peta konflik yang terjadi di Thailand Selatan. Dengan menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf dengan pendekatan sosiologi politik Islam sebagai dasar analisisnya. Dengan harapan bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengurai konflik sekaligus menawarkan solusi yang sesuai

Asia tenggara, (Jakarta:LP3ES, 1989), hlm.239.

⁷ <http://dokumen.tips/documents/identitas-primordial-konflik-thailand-patani.html>, (02February 2016).

dengan prinsip Islam. Dari penjelasan tersebut, maka rumusan masalah yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah (1) apa faktor penyebab konflik di Thailand Selatan; dan (2) bagaimana upaya pemerintah dalam meredam konflik di Thailand Selatan.

Sosial Politik dan Dinamika Konflik Masyarakat Thailand Selatan

Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan antara benua Australia dan daratan Cina, daratan India sampai laut Cina. Dengan begitu, Thailand cukup mudah untuk dijangkau para pelancong dari zaman kezaman untuk mencari penghidupan maupun penyebaran agama.⁸

Muang-thai diambil dari nama salah satu suku bangsa di sana, yaitu suku Thai artinya negara dahulu orang eropa menyebut negara ini *Siam*. Bentuk pemerintahannya adalah kerajaan berkonstitusi, tetapi pemerintahan sehari-hari dikendalikan oleh seorang perdana menteri. Thailand administratif pemerintahannya terbagi menjadi 77 provinsi,⁹ Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tak pernah dijajah. Dengan luas wilayah mencapai 510.000 kilometer persegi.

Politik Thailand saat ini dilakukan dalam rangka sebuah monarki konstitusional yang demokratis. Namun, Raja tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan sehari-hari. Ada dewan negara Thailand, beranggota 18 orang yang diangkat Raja, yang fungsinya memberi nasehat berdasarkan permintaan Raja, dimana perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Peradilan independen dari eksekutif dan legislatif. Raja adalah kepala angkatan bersenjata dan penegak semua agama. Sebagai kepala negara, raja melaksanakan

⁸ Dedi Supriadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 211.

⁹ Surin Pitsuwan, *Islam di Muang Thai*, hlm. 69. Abu Arrimi Ali, *Prawatsatr Khun Nang Muslim Siam*, (Bangkok: The Islamic Center, 2004), hlm. 49. Nick Asra, *Cak Siam Su Thailand Karn Plian Pleang Prathes Samai Compol Phibul Songkram*, (Bangkok: Kau Reak, 2011), hlm. 30.

kekuasaan legislatifnya melalui parlemen: kekuasaan eksekutifnya melalui kabinet: kekuasaan yudisial melalui pengadilan. Kerajaan memiliki hak untuk mendukung dan hak untuk memperingatkan pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan urusan negara atas nama kebaikan rakyat.

Badan legislatif Thailand adalah bikameral. 500 anggota legislatifnya (anggota parlemen) dipilih secara populer. Menduduki jabatan selama 4 tahun. 400 anggota berasal dari daerah (dipilih langsung oleh konstituennya; masing-masing mewakili sekitar 150.000 orang) 100 anggota berasal dari partai (dipilih secara tidak langsung oleh persentase suara yang diterima partai). Senat terdiri dari 200 kursi.

Senator Thailand dipilih langsung untuk pertama kalinya pada 2 Maret 2000 (sebelumnya diangkat oleh raja atas rekomendasi dewan menteri). Menduduki jabatan selama 6 tahun. Lembaga eksekutif dipimpin oleh perdana menteri (sejak amandemen konstitusi 1992 harus anggota parlemen). Kabinet bertanggung jawab atas administrasi 14 kementerian, dan kantor perdana menteri.

Konstitusi adalah memegang peranan tertinggi negara Thailand yang menetapkan kekuasaan, fungsi dan tugas serta struktur eksekutif, legislatif dan kehakiman. Konstitusi sekarang dari Thailand, yaitu konstitusi kerajaan Thailand, 1997 memiliki dampak besar pada reorganisasi sistem politik serta sistem peradilan di Thailand. Jenis-jenis pengadilan diakui di bawah konstitusi adalah: Mahkamah Konstitusi, pengadilan, pengadilan administrasi dan pengadilan militer. Mahkamah konstitusi dan pengadilan tata baru-baru ini di dirikan sebagai hasil dari ketentuan konstitusi tersebut. Meskipun perubahan ini mengurangi lingkup yurisdiksi pengadilan kehakiman, sebagian besar kasus termasuk dalam yurisdiksi pengadilan kehakiman.

Thailand Selatan mempunyai identitas sejarah kenegaraan, keagamaan dan kebudayaan tersendiri terdiri dari provinsi Pattani, Narathiwat dan Yala. Provinsi-provinsi Selatan bagian bawah dikenal dengan (tiga provinsi selatan), kedudukannya secara umum merupakan daerah kekuasaan

politik yang mempunyai latar belakang sejarah kedaulatan. Profesi di masing-masing provinsi:

- a) Provinsi Pattani yang mayoritas penduduknya adalah etnis Melayu yang beragama Islam. Geografisnya memiliki keindahan alam seperti air terjun dan pantai pasir putih. Mata pencaharian penduduk provinsi Pattani adalah perkebunan karet, perkebunan buah-buahan dan nelayan. Produk provinsi Pattani yang terkenal adalah ikan asin, kerudung, dan busana muslim serta kesenian produk pakaian batik. Provinsi Pattani merupakan pusat muslim yang memiliki ratusan pondok dan masjid. Salah satu masjid terbesar dan terindah adalah Pattani *Central Mosque*. Provinsi Pattani berjarak 99 km dari Songkla dan 1.055 km dari ibu kota Bangkok.
- b) Provinsi Yala, merupakan provinsi yang berbatasan dengan Perak dan Perlis, Malaysia. Kondisi geografisnya terdiri dari pegunungan, hutan, dan air terjun. Mata pencaharian penduduk provinsi Yala adalah petani padi dan perkebunan karet serta produk-produk herbal. Letaknya provinsi Yala berjarak 128 km dari Songkla dan 1.084 km dari ibu kota Bangkok.
- c) Provinsi Narathiwat, merupakan provinsi yang terletak di paling Selatan, berbatasan langsung dengan Kelantan, Malaysia. Provinsi Narathiwat berjarak 194 km dari Songkla dan 1.149 km dari ibu kota Bangkok. Mata pencaharian penduduk provinsi Narathiwat adalah perkebunan karet, perkebunan buah-buahan dan nelayan. Produk provinsi Narathiwat yang terkenal adalah buah-buahan.

Jumlah semua penduduk Thailand 67.741.401 jiwa.¹⁰ Dalam sensus menetapkan populasi Melayu Patani di tiga provinsi (Pattani, Narathiwat dan Yala) 1.673.900 jiwa, dari jumlah penduduk Muslim 2.345.800 jiwa di 14 provinsi Thailand Selatan. Menurut sensus yang dilakukan oleh *National Statistical Office, Office of the Prime Minister Bangkok*, bahwa angka penduduk muslim di Thailand Selatan adalah di provinsi Pattani

¹⁰ Artikel tentang ilmu pengetahuan umum, Teknologi dan daftar top 10 di dunia ini, (estimasi juli, 2014).

sebanyak 596.000 jiwa, di provinsi Yala sebanyak 415.500 jiwa, dan di provinsi Narathiwat sebanyak 662.400 jiwa. Namun, pada umumnya angka ini tidak disetujui oleh lembaga-lembaga Islam di Thailand, antara lainnya: *Cularajmontri*, mereka memperkirakan jumlah penduduk muslim lebih besar dari angka perhitungan pihak kerajaan. Jumlah penduduk dan rumah tangga dalam *Youth-led Consultion Process for Peace in Southern Thailand, Youth Coordination Center International*.¹¹

Situasi Masyarakat Thailand Selatan

Di Thailand, orientasi dunia Islam dan Budha berbeda, sesuai dengan perjalanan hidup mereka masing-masing. Keturunan Thai-Budha lebih dekat kepada negara Cina, India, Jepang, dan Sri Langka, karena mereka penganut Budha, sementara masyarakat Melayu Patani lebih mendekati dunia Melayu Nusantara dari kebudayaan dan peradaban Islam negara Arab.

Kelompok mayoritas di bagian Selatan adalah Melayu Patani (tiga provinsi Pattani, Narathiwat dan Yala). Daerah Patani ini, merupakan basis masyarakat muslim Melayu adalah daerah konflik agama, budaya dan persengketaan wilayah dengan latar belakang etnis, budaya dan agama yang berkepanjangan. Wilayah bagian Selatan merupakan daerah pusat muslim Melayu, dari perbatasan Malaysia sampai kawasan *Kbo Kra (Segenting Kra)*¹²

Konsep Melayu dalam bahasa lebih populer dikenal dengan istilah Thai Muslim atau Thai Islam oleh pemerintah Thailand. Dalam undang-undang Kenegaraan, tahun 1945 M., untuk pertama kalinya umat Islam di Thailand secara resmi menjadi rakyat Thai yang menganut agama Islam (*Prachachon Chau Thai Thi Nabtue Sasna Islam*), hingga istilah Thai-Muslim ini

¹¹ Sumber data: Pusat Arahan Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan, Provinsi Yala, 2016.

¹² Usaman madami, Islam di Muang Thai Selatan Inkulturasi Nilai-nilai Islam dalam Kebudayaan Melayu, (Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 123.

memicu kontradiksi antara Thai-Muslim dengan Thai-Budha, karena istilah Thai dalam pemahaman masyarakat Islam merupakan sinonim dari kata Budha, sedangkan kata Melayu identik dengan Islam pada waktu itu.

Gambaran ke-Thai yang banyak digunakan mengandung aspek nasionalisme sekaligus kultural. Penggunaan istilah ke-Thai secara jelas terlihat dari penggunaannya yang sering merujuk dan cenderung pada tiga lembaga tertinggi dalam negeri yaitu; lembaga kebangsaan (Chat), lembaga keagamaan (Sasna), dan lembaga Raja (*Phra Maha Kasatra*). Istilah ini berkaitan erat, bahkan secara eksklusif, dengan agama Budha dan budaya masyarakat *Siam* (Thai-Budha).¹³

Perlu diperhatikan, bahwa istilah *sasna* (agama) dalam konteks Thailand, hanya merujuk kepada norma-norma agama Budha, baik secara teoretis maupun praktis. Kenyataannya terdapat dalam *Rathamanun* (kanun-kanun kenegaraan) dan realitas masyarakat Thailand. Krisis dan konflik yang terjadi antara masyarakat Melayu Patani dengan pemerintah Thailand bertambah kuat. Keadaan dan situasi sosial-politik tersebut terus berlangsung tegang, karena pemerintah Thailand meneruskan program integrasi dan asimilasi keagamaan dan kebudayaan atas masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan.

Dengan program kebijakan pemerintah dalam membina masyarakat Thailand yang multi-kultural (Budha, Melayu, India dan Cina) untuk mewujudkan perdamaian, maka pemerintah berwenang melaksanakan rencana ini dengan memberi sebuah dogma yaitu *Wattanatham Haeng Chat* (kebudayaan nasional). Rencana ini dipertanggung jawabkan oleh kementerian kebudayaan nasional, dengan dasar dan tujuan memberi kebebasan dalam menganut agama dan kebebasan dalam melaksanakan ritual-ritual keagamaan dan kebudayaan yang tidak tersentuh dengan meremehkan kelembagaan negara,

¹³ Terminologi "*Muslim Melayu*" digunakan untuk masyarakat negara Thailand yang berbangsa dan berbahasa Melayu, yang ditunjuk sebagai "*Kbeak*" (tamu) dalam bahasa populer dengan "*Thai-Muslim*" atau "*Thai-Islam*" oleh pemerintah Thai.

agama, dan raja.¹⁴

Kedudukan masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan berbeda dengan masyarakat Thai-Budha yang dominan dan berkuasa di Thailand dalam berbagai aspek. Aspek-aspek tersebut meliputi segi keagamaan, etnis, bahasa, budaya dan sejarah. Selain itu, masyarakat Melayu Patani mempunyai persamaan dan hubungan akrab dari segi agama, bangsa, budaya dan bahasa yang dominan di negara jiran Malaysia. Hal ini menjadikan masyarakat Melayu Patani sebagai masyarakat yang sensitif dalam isu-isu keagamaan dan kebudayaan di Thailand.¹⁵

Ketika kerajaan Kesultanan Islam Melayu Patani Darussalam dihapuskan pada tahun 1902 M, secara mutlak masyarakat Melayu Patani dalam keadaan sangat tertekan, khususnya pada periode pemerintahan jenderal Luang Pibul Songgram pada (1939-1944 M.) dan Marshal Sarit Thanarath pada (1958-1963 M.), masyarakat Melayu Patani menjadi mangsa dasar program asimilasi nasionalisme dan kebudayaan.¹⁶ Bahkan sampai sekarang masyarakat Melayu Patani masih menghadapi diskriminasi konflik keagamaan dan kebudayaan dan aksi teror yang berlarut-larut, sehingga kehidupan sosial keagamaan, kebudayaan, kependidikan, politik dan ekonomi masyarakat Melayu Patani sangat terbatas dan sempit.¹⁷

Sejak penaklukan yang dilakukan kerajaan Thailand terhadap wilayah- wilayah Melayu Patani lebih dari dua abad yang silam, status keagamaan, kebudayaan, kependidikan, ekonomi dan politik masyarakat Melayu Patani semakin

¹⁴ Kementerian Kebudayaan Nasional, *Karn Serm Sarnng Watthanatham Prachatiptai Nai Sangkum Thai*, (Bangkok: Kementerian Kebudayaan Nasional, 2009), hlm. 2.

¹⁵ Malise Ruthven, Azim Nanji, *Historical Atlas of Islam*, (Massachu Setts: Harvard University Press Cambridge, 2004), hlm. 153.

¹⁶ Herry Nurdi, *Perjuangan Muslim Patani Sejarah Panjang Penindasan dan Cita-cita Perdamaian di Patani Darussalam*, (Kuala Lumpur: Alam Raya Enterprise SDN BHD, 2010), hlm. 42.

¹⁷ Aek Tangsupvattana, Ora-orn Poocharoen, *Problem of the Three Southern Border Provinces: Policy Recommendation*, (Bangkok: Chulalongkorn University, 2009), hlm. 113.

terdesak. Desakan-desakan tersebut telah mengakibatkan timbulnya reaksi di kalangan Masyarakat Melayu Patani. Bagi masyarakat Melayu Patani perubahan dalam sistem pemerintahan ini merupakan penjajahan atas bangsa mereka. Dalam kasus masyarakat Melayu Patani, bahwa faktor agama, bangsa, bahasa, budaya dan kesadaran akan suatu identitas tersendiri telah dimobilisasi untuk mengkonsolidasikan solidaritas keislaman dan kemelayuan dalam menahan upaya-upaya pengintegrasian dan pengasimilasian yang dilakukan oleh pemerintah Thailand.

Strategi pemerintah Thailand terhadap masyarakat Melayu Patani dengan memberi keleluasan dan kelonggaran dalam melaksanakan aktivitas keagamaan dan kebudayaan, telah memberi hasil dan kesan dalam mendorong masyarakat Melayu Patani untuk bersikap pro dan terbuka terhadap pemerintah. Pemerintah Thailand menyediakan bantuan dalam mengurus masalah yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan dan kebudayaan. Program ini disusun oleh pemerintah Thailand dalam rangka memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan dan kebudayaan.

Di satu sisi, program migrasi penduduk Thai-Budha ke daerah Patani telah meningkat jumlah penduduk non-muslim di daerah Patani. Dampak dari program ini telah menimbulkan pengaruh psikologis dan sosial masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan. Percampuran dua budaya antara Melayu dengan Thai- budha telah mendorong keberhasilan program integrasi. Akibatnya, lahirlah perubahan kebudayaan. Golongan-golongan yang berpendidikan Thailand umpamanya, mempunyai hubungan erat dengan kaum yang berbudaya lain sehingga ada pengambilan kebudayaan asing sebagai ciri budayanya sendiri.

Sistem Sosial Masyarakat Melayu Patani

1. Sistem Keagamaan

Keyakinan terhadap ajaran Islam yang diterima oleh masyarakat Melayu Patani dinilai sebagai suatu ajaran yang sesuai dan relevan dalam setiap konteks ruang dan waktu. Al-

Qur'an, Hadis Nabi, dan pendapat para ulama merupakan referensi yang menjadi dasar pegangan keyakinan tersebut, sehingga kesakralan sumber keagamaan ini tidak dapat disentuh kecuali oleh para ulama yang dapat memberi suatu keterangan tentang Islam yang terkandung dalam sumber ajaran Islam. Dalam masyarakat Melayu Patani terdapat suatu persepsi yang terintegrasi mengenai agama, nilai-nilai tradisional, sukar bagi masyarakat Melayu Patani untuk memisahkan nilai-nilai Islam dari kebudayaan Melayu.

Gambaran keagamaan secara animis, Hindu-Budha yang berbaur dengan tradisi Melayu, tampak di tengah-tengah masyarakat Melayu Patani, terutama dikalangan masyarakat yang tinggal di desa-desa. Berbagai kepercayaan dan praktik ritual keagamaan yang dapat digolongkan atas metafisik teologis yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat Melayu Patani. Dalam masyarakat Melayu Patani, kehidupan sosial keagamaan berkaitan antara agama dan etnisitas, tentu saja sikap terhadap Islam yang bersifat ritus dan adat yang ditemukan dalam pelaksanaan ritual keagamaan bagi masyarakat Melayu Patani.

Desain umum sistem keagamaan dalam masyarakat Melayu Patani yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial-budaya, menjelaskan bahwa nilai-nilai Islam berfungsi dalam kehidupan masyarakat Melayu Patani. Nilai-nilai Islam sebagai referensi bagi tindakan pemenuhan kebutuhan hidupnya.¹⁸ Nilai-nilai Islam dan kebudayaan Melayu saling menyerap dan membentuk serta mempersatukan masyarakat Melayu Patani, sehingga dalam perwujudan desain umum keagamaan yang dijadikan pedoman oleh masing-masing individu dalam masyarakat diwarnai oleh lingkungan sosial-budaya dalam masyarakat Melayu Patani.

Jejak-jejak kepercayaan dan kebudayaan yang ditinggalkan oleh amalan-amalan warisan masa lalu telah menghasilkan suatu yang saling melengkapi antara Melayu dan

¹⁸ Mujahirin Thohir, *Orang Islam Jawa Pesisiran*, (Semarang: Fasindo Press, 2006), hlm.

8.

Islam di masyarakat Melayu Patani. Dengan menggunakan simbol budaya, cara hidup, bahasa, perilaku, dan adat istiadat setempat jauh lebih mudah diterima oleh masyarakat.¹⁹

Jika ditinjau dari berbagai sudut, ajaran agama Islam merupakan agama wahyu yang bersifat *syamil*, namun kenyataannya dalam masyarakat Melayu Patani masih mempraktikkan ritual keagamaan yang bercampur dengan adat tradisi, dengan alasan tidak mengetahui atau mengabaikannya serta masih terdapat ruang dan kesenjangan antara Islam ideal dan Islam praktek. Berdasarkan sudut pandang terhadap sistem keagamaan, masyarakat Melayu Patani secara garis besar dibagi dalam dua kelompok yaitu kelompok berpendidikan, untuk mereka yang benar-benar mengetahui hukum agama, dan sebagainya, dan kelompok yang kurang berpendidikan agama, tetapi mengetahui ajaran agama secara umum, cara-cara menunaikan kewajiban agama, namun jarang melaksanakan kewajiban agama.²⁰

Ritual keagamaan dalam praktek kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu Patani, baik ritual *fardiyyah* maupun ritual *jama'iyah* merupakan salah satu wujud dari kebudayaan yang berperan dan berfungsi membentuk dan menciptakan sebuah solidaritas dalam masyarakat Melayu Patani. Hal tersebut mempunyai arti bahwa nilai-nilai Islam merupakan pelengkap yang berfungsi untuk mempererat ikatan persaudaraan antara individu warga masyarakat, sebagaimana *Radcliffe-Brown* melihat bahwa, fungsi agama dalam berbagai peribadatan memiliki fungsi sosial tertentu dan dalam batas tertentu. Peribadatan tersebut berfungsi untuk mengatur dan mentransmisikan berbagai segmen, dari satu generasi untuk generasi selanjutnya sebagai salah satu acuan pokok bagi terbentuknya aturan masyarakat yang bersangkutan.

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun*, (Jakarta: Para Madina, 1995), hlm. 548.

²⁰ Wawancara Usaman Madami, warga Patani, Yala, 17 February 2016.

2. Sistem Kebudayaan

Dalam perspektif kebudayaan Melayu Patani, agama Islam dapat mengambil suatu bentuk dan berfungsi sebagai acuan tindakan bagi perilaku masyarakat Melayu Patani, demikian juga sebagai pemenuhan kebutuhan adat masyarakat setempat. Nilai-nilai Islam merupakan suatu unsur yang paling terkesan dalam menentukan identitas Melayu Patani di Thailand Selatan. Hal tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh sekretaris Majelis Agama Islam Wilayah Yala bahwa "Mempertahankan kebudayaan Melayu berarti mempertahankan agama Islam".²¹

Faktor yang menyebabkan tetap kuatnya kesadaran, kesetiaan dan rasa keterikatan kultural bagi masyarakat Melayu Patani adalah peran sejarahnya. Dalam catatan sejarah, negeri Patani Darussalam merupakan salah satu pusat peradaban dan kebudayaan Islam Melayu yang terpenting di kawasan Semenanjung Melayu. Lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan para ulama berfungsi sebagai penghubung dan kekuatan dalam menentukan dan selalu memberikan inspirasi yang riil kepada harapan masyarakat awam dalam memperoleh identitas. Kekuatan inspirasi tersebut menjadi dasar dalam peran sejarahnya, sistem sosial, baik dalam urusan yang menyangkut dengan urusan keagamaan dan kemasyarakatan diatur oleh masyarakatnya sendiri. Dalam hal ini para ulama yang berfungsi dalam bidang pendidikan keagamaan, pemimpin keagamaan dalam masyarakat, bahkan urusan duniawi sekalipun.

Masyarakat Melayu Patani menurut tipologinya dapat dibagi sebagaimana yang digambarkan oleh Surin Pitsuwan, bahwa masyarakat Melayu Patani seperti masyarakat Muslim Jawa yang dilukiskan oleh Geertz.

Orang-orang Melayu Patani juga dibagi dalam kategori abangan dan santri. Golongan abangan, yaitu golongan muslim marginal yang mengutamakan ritual-ritual dan praktek animisme, adapun golongan santri yaitu golongan muslim yang lebih berpengetahuan dan menaruh perhatian terhadap

²¹ Wawancara H. Abd.Harem Hile, Sekretaris Majelis Agama Islam Wilayah Yala, 12 February 2016.

kemurnian ajaran agama, tetapi dalam konteks masyarakat Melayu Patani hal tersebut dinyatakan dengan istilah orang '*alim*' dan orang '*awam*'.

Kedudukan dan keadaan sosial kemasyarakatan Melayu Patani dianggap sebagai masyarakat yang sangat terisolasi dari masyarakat mayoritas Thai-Budha. Karakteristik sosial dan kebudayaannya juga terisolasi sehingga masyarakat Melayu Patani menjadi masyarakat pedesaan dan masyarakat tertutup. Istilah masyarakat pedesaan dan masyarakat tertutup dalam konteks masyarakat Thailand umumnya mencerminkan kehidupan sosial di perkotaan yang secara dominan merupakan daerah Thai-Budha.

Hal tersebut menjadi alasan bahwa faktor keagamaan dan kebudayaan yang merupakan unsur paling penting dari identitas Melayu Patani, sebagai akibat dari kecenderungan untuk menjauhkan diri dari orang asing, khususnya penganut agama lain (dalam konteks agama Budha). Pandangan yang fungsionalistis dan perbedaan logika dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan menjadi salah satu penyebab nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan mendominasi penyajian sehingga mempunyai peranan penting yang harus dimainkan oleh masing-masing individu dalam masyarakat.

Nilai-nilai Islam dalam Melayu Patani telah mempengaruhi jalannya perkembangan pemikiran terhadap agama. Hubungan antara agama Islam dan masyarakat Melayu Patani telah memberi banyak kemungkinan, bahwa kebudayaan Melayu Patani yang didasari oleh nilai-nilai Islam telah menimbulkan suatu kesadaran baru mengenai identitas etnis yang membedakan orang Melayu Patani dari orang *Siam* atau Thai-Budha.

Bagian terbesar dari interaksi sosial dalam konteks ritual keagamaan dan kebudayaan cenderung untuk memperkuat identitas keagamaan Islam dan kebudayaan Melayu, hingga pada kenyataannya nilai-nilai Islam merupakan unsur penting bagi identitas kebudayaan Melayu Patani, dan menganggap aturan hukum Islam sebagai aturan yang mengikat secara moral. Titik tolak keadaan kerukunan yang bertambah baik bagi masyarakat

Melayu Patani adalah kecenderungan etnis kehidupan, hidup berkeluarga dan berkarabat, penuh kasih sayang dan sikap tolong menolong, ditambah dengan sifat keyakinan terhadap nilai-nilai keagamaan dan kerukunan terhadap adat istiadat, dan dengan demikian melahirkan kehidupan masyarakat Melayu Patani yang memiliki kesadaran keagamaan dan kebudayaan.

Di sisi lain, kebudayaan asing dengan pengaruh era globalisasi (kebudayaan Barat) tersebar dan semakin memperoleh tempat di kalangan masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan, terutama di kalangan generasi mudanya. Dampak gaya hidup dalam masyarakat Melayu Patani, misalnya berbagai gaya hidup modern, penggunaan bahasa dalam komunikasi dengan bahasa Thai, berpakaian ala Barat yang sama sekali tidak menggambarkan ciri-ciri kebudayaan Islam Melayu.

Walaupun generasi-generasi baru sudah banyak terpengaruh dengan kebudayaan Thailand, terutama dalam mengguna bahasa Thai, tetapi dapat menunjukkan bahwa bahasa Melayu tetap terjaga dalam masyarakat. Dalam mewariskan bahasa Melayu yang menjadi peninggalan bernilai bagi masyarakat Melayu Patani, para pemimpin agama dan pemimpin masyarakat telah memberi kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga kebudayaan Melayu, sehingga terdapat pepatah Melayu "*basa nayu adalah jiwa bagi bangsa nayu*" (Bahasa Melayu adalah Jiwa Bagi Bangsa Melayu).

Bahasa Melayu merupakan simbol nasionalisme terpenting, sehingga nasionalisme Melayu tidak bisa digambarkan tanpa bahasa Melayu. Dengan kehilangan bahasa, maka jati diri bangsa itu juga akan hilang pula, seperti dalam pepatah di kalangan masyarakat Melayu Patani yang mengatakan "hilangnya bahasa lenyaplah bangsa, musnah agama".

Dalam struktur kepemimpinan dalam masyarakat Melayu Patani, kepemimpinan terdiri dari kalangan para ulama. Mereka berperan dalam hal keagamaan dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat, serta berperan penting dalam melaksanakan berbagai tugas dan aktivitas bersama dengan

masyarakat seperti melaksanakan kegiatan pengajian, pelaksanaan ritual keagamaan dan kebudayaan dalam masyarakat, dan urusan berhubungan dengan pihak pemerintah di bidang keagamaan.

Di sisi lain, akibat komoditas pasar yang meluas dan berkembang, media massa dan informasi serta pengetahuan berkembang dengan cepat, meskipun pembangunan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan diabaikan, tetapi masyarakat Melayu Patani sangat tertarik pada permasalahan tersebut. Hal ini disebabkan karena banyak di kalangan masyarakat Melayu Patani yang mulai merasa gelisah terhadap cepatnya pengambil-alihan gaya hidup asing sehingga masyarakat Melayu Patani menyadari dan merangsang minat untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebudayaan Melayu tradisional.

Ketidak nyamanan kehidupan modernitas berhubungan dengan nilai-nilai yang selalu berubah ekonomi, sosial, keagamaan, dan kebudayaan yang telah memberi kesan mendalam terhadap gaya hidup masyarakat Melayu Patani. Dari hal tersebut seakan-akan nilai-nilai Islam dan budaya Melayu telah tergantikan, sehingga kekhawatiran generasi tua bahwa kemajuan hanya bersifat dangkal. Dengan demikian mereka berharap nilai-nilai yang lebih bersifat rohani dibangkitkan kembali, karena perubahan nilai-nilai adalah perubahan yang paling penting dalam kebudayaan yang mempengaruhi norma-norma etika, tata cara hidup, dan nilai-nilai Islam dan budaya Melayu dalam masyarakat.

3. Sistem Pendidikan

Pada tahap awal pendidikan agama Islam di Patani dilaksanakan dengan sistem belajar di surau dan di pondok pesantren tradisional, dengan mendapat pelajaran Al-Qur'an. Bagi masyarakat Melayu Patani, menurut Ahmad Toyong (seorang anggota Majelis Agama Islam Wilayah Yala) pendidikan keagamaan Islam menjadi tolak ukur dalam kehidupan. Dalam masyarakat Melayu Patani, pendidikan keagamaan, terutama pengajian al- Qur'an diberikan sejak usia

dini, mulai dari pengajian *khadea (alif-ba-ta)* sampai khatam al-Qur'an, dan bahkan pegangan masyarakat Melayu Patani bahwa anak laki-laki dan perempuan tidak diizinkan menikah sebelum tamat ngaji al-Qur'an.

Selanjutnya pendidikan pondok sebagai lembaga pendidikan yang amat penting di Thailand Selatan. Khusus di daerah Patani, lembaga pondok telah berubah menjadi lembaga kebangsaan Melayu Patani dengan cita-cita Islam serta aspirasi mereka untuk mewujudkan cita-citanya. Para ulama yang memberi bimbingan terhadap pelajar pondok berfungsi sebagai model segala keutamaan Islami dan wawasan-wawasan etnis bagi santri dan masyarakat Melayu Patani. Seorang guru berkewajiban untuk memberi pelajaran dan memurnikan ajaran dalam hal praktek Islam sebagai kewajiban sosial, disamping kewajiban pribadi untuk mentaati perintah-perintah Islam.

Dewasa ini, dengan usaha dan upaya pemerintah Thailand dalam memberlakukan berbagai kebijakan, ujung dari kebijakan tersebut yang bagi masyarakat Melayu Patani adalah suatu kebijakan yang bisa ditebak akan membawa akibat kehancuran pewarisan peradaban dan kebudayaan Islam Melayu. Salah satu contoh yang mudah dilihat adalah pemberangusan lembaga pendidikan Islam tradisional *ponok*. Memang itu sengaja dipilih bukan suatu kebetulan, karena *ponok* dalam sejarahnya memainkan peranan penting yang sangat vital, mati dan hilangnya citra tradisi *ponok* akan mengantarkan masyarakat Melayu Patani pada ajalnya secara sistematis.

Beberapa kebijakan mengenai unsur-unsur pendidikan yang terdapat di Patani, di antaranya: (1) Bahasa pengantar di sekolah agama dan pondok yang dahulunya berbahasa arab dan Melayu oleh dipaksa tukar ke dalam bahasa Thai sebagai ganti; dan (2) Buku agama diterjemahkan ke dalam bahasa Thai, serta kaedah dan pembelajaran mengikuti dasar pendidikan Thailand.

Pemerintah Thailand pusat menggunakan pendidikan sebagai sebuah mekanisme bagi terciptanya keseragaman nasional, di antara kelompok- kelompok warga negara yang

heterogen. Hal ini tercermin pada kurikulum di setiap tentang pendidikan yang menekankan penyaluran kebudayaan nasional. Penyusunan dan penghormatan terhadap sejarah nasional, serta lembaga- lembaga dan bahasa nasional. Beberapa buku teks digunakan oleh sekolah- sekolah pemerintah diseluruh kerajaan yang dipersiapkan oleh kementerian pendidikan nasional.

Pelajaran nasional Thailand dijalankan seiring dengan pengajaran nilai-nilai agama Budha, karena pegawai yang beragama Budha mendapat peran utama dalam bidang pendidikan. Adapun yang diusahakan oleh pemerintah Thailand, tidak membuahkan hasil yang meluaskan. Sebaliknya langkah-langkah tersebut telah menimbulkan kemarahan masyarakat Melayu Patani. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan baru yang lebih strategis. Pemerintah mulai ikut campur tangan dalam pendidikan pondok dengan memasukan sistem pendidikan semi sekuler di lembaga pondok dengan harapan dapat melahirkan pelajar yang dapat berbahasa Thai. Mempunyai semangat dan merasakan diri mereka sebagai dari pada warga negara Thailand. Strategi pemerintah Thailand memang membuahkan hasil, banyak generasi-generasi muda Melayu Patani lebih suka berbahasa Thai dibandingkan bahasa Melayu, baik di sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi mereka 'dipaksa' keluarga untuk berbicara dalam bahasa Melayu ketika mereka berkumpul dilingkungan keluarga, itu strategi yang bisa menghilangkan identitas Melayu Patani²².

Memandang taraf dan kualitas pendidikan di kalangan masyarakat Melayu Patani yang rendah, salah satu penyebabnya adalah karena tidak adanya minat orang tua terhadap pendidikan sekuler. Kebanyakan orang tua lebih suka menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga pendidikan agama, karena mereka lebih senang melihat anak-anak mereka menjadi seorang yang saleh, taat kepada perintah agama, dan adanya pandangan bahwa dengan pendidikan sekuler akan

²² Wawancara Hasbu Hassan, Sejarawan, 24 February 2016.

membawa kepada hal yang tidak Islami. Sebagai sebuah harapan dan cita-cita bagi masyarakat Melayu Patani dewasa ini adalah mengembalikan hak-hak sipil dalam bentuk pendidikan, dengan menjamin hak-hak kelembagaan dan institusi pendidikan informal seperti *ponok*, madrasah, dan taman didikan kanak-kanak yang telah berkembang di Patani sejak lama. Masyarakat Melayu Patani mereka merasa hal tersebut adalah usaha awal dari pihak pemerintah Thailand untuk menghapus dan menghilangkan kesadaran keagamaan dan kebudayaan dari generasi muda adalah suatu hasil yang besar akan mengurus identitas kemelayuan.

4. Sistem Politik

Sejarah politik masyarakat Melayu Patani secara definitif dimasukkan di bawah kekuasaan kerajaan Thailand. Kedudukan masyarakat Melayu Patani merupakan suatu golongan minoritas yang terjebak di tengah revitalisasi dan kebangkitan ideologi aksi politik yang dihadapkan pada dua dilema. Bagi masyarakat Melayu Patani hanya ada dua pilihan yaitu pertama; menyesuaikan diri secara pasif, suatu hal yang sangat tidak menyenangkan, mengingat karekteristik keagamaan dan kebudayaan mereka, dan kedua; menentang dengan berbagai aksi protes dan perlawanan. Agama dan budaya merupakan suatu simbol yang terpenting dalam memberi aspirasi dan berfungsi sebagai suatu bangsa yang dikuasai oleh bangsa lain, yang di dalam masyarakat Melayu Patani tetap muncul dalam kesadaran sikap perlawanan.

Dalam politik Thailand terhadap masyarakat Melayu Patani, terdapat unit khusus untuk mengawasi dan menjaga keamanan negara yang diselenggarakan pada bidang-bidang yang penting, yaitu bidang ketentaraan bagian Selatan yang disebut dengan *Kong Thap Pak Ti Si* (Angkatan Tentara Bagain ke-4), dan pemerintah wilayah di bagian Selatan dibentuk badan khusus yang disebut dengan *Sun Amnuia Karn Boribarn Sam Cangwad Cai Dean Pak Tai* (pusat administrasi tiga provinsi sempadan Thailand Selatan).

Sekarang di era saat pengelola negara oleh kekuasaan

junta militer, kata-kata "Daerah Ruang Politik" digantikan pula "Daerah Aman". Secara signifikan berbicara dengan sebagian besar "Daerah Aman" dalam prakteknya, jika itu benar-benar faktor kunci yang tidak didasarkan pada kekuatan sektor umum. Jika perlu juga untuk mundur dari posisi konflik itu adalah pemerintah Thailand dengan gerakan separatis pentingnya, akan hasil untuk menjadi nyata dalam praktek. Namun pada kenyataannya sekarang sikap oposisi utama yang sedang konflik, hal ini juga bergantung pada kemampuan militer dari masing-masing pihak sendiri yang dapat mengalahkan satu sama lain.

Perundingan proses perdamaian telah berlangsung dengan secara resmi sejak tahun 2013, tapi itu tidak memiliki perjanjian resmi yang akan mengurangi atau berakhir tindakan bersenjata atau dengan kata lain tidak ada kesepakatan dengan "Daerah Aman" tentu saja. Sangat menarik bahwa "Daerah Aman" sebagai arus relatif tinggi sekarang gini, berhubungan atau konflik tumpang tindih dengan istilah "Daerah Ruang Politik".

Jika kata-kata "Daerah Aman" memperkuat ikatan "Daerah Ruang Politik" mungkin ini adalah hal yang baik, tetapi jika "Daerah Aman" seola-olah bertentangan merusak dengan "Daerah Ruang Politik", jika demikian, itu adalah berita buruk bagi masyarakat di Patani dan masyarakat di seluruh negara Thailand, karena fenomena ini sangat kondusif untuk membagi dana turun, dengan banyak pengunjung dari berbagai kelompok tapi penghancuran beberapa kelompok lain, ini adalah kelompok yang telah terperinci dari wacana politik yang berpengaruh mendominasi pikiran sebagian besar dalam masyarakat akan terancam kekerasan dan kebenaran.

Jika implikasi penting kata-kata "Daerah Aman" yang akan menjadi arus relatif tinggi berbanding sekarang membawa kearah merusak dengan kata-kata "Daerah Ruang Politik", sebenarnya itu berarti bahwa modus tingkat kekerasan dari konflik bersenjata di daerah wilayah Selatan atau Patani ini akan menimbulkan lebih tinggi (besar) dari pada sebelumnya "Karena kebiasaan dari pihak orang yang dimusnahkan tentu

dia harus memperjuangkan hidup lebih keras lagi".

Sejarah Konflik di Thailand Selatan

Awal hubungan antara kerajaan Thailand dan kerajaan Patani didasarkan pada kerangka sistem sungai di mana pemerintah lemah dan negara mengakui supremasi raja Thailand. Dalam prakteknya, mereka mengirim upeti secara berkala dalam bentuk simbolis dari perak dan emas bunga (bunga mas) ke pengadilan Thailand. Hubungan kekuasaan tersebut berteori sebagai sistem mandala dimana kekuatan paling kuat di sekitar pusat dan surut yang lebih jauh itu adalah dari pusat. Ini berarti bahwa secara historis suatu negara bawahan seperti Patani memiliki beberapa otonomi dalam pemerintahan sendiri sambil mempertahankan status anak sungai dengan *Siam*

Secara historis, ada dua jenis kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand atas wilayah Patani. Salah satunya adalah aturan langsung dan aturan tidak langsung. Aturan yang terlibat langsung mengirim pejabat Thailand untuk memerintah kerajaan Muslim; orang *Siam* dikenakan pada kelompok penguasa lokal dan penduduk. Hasil dari awal perlawanan dan ketidakpuasan para penguasa Patani dan orang-orang yang cenderung untuk memungkinkan peran yang lebih dan kepentingan dengan elit Muslim lokal dan dengan demikian memberikan persyaratan lagi hubungan damai antara kedua belah pihak.

Melayu Patani telah menjadi warga negara Thailand, bukan karena pilihan mereka sendiri, tetapi oleh kekuatan sadar dan paksaan oleh pemerintah Thailand dalam serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk menegakkan Thailand-*ization* provinsi Melayu, 1902-1944. Sebagai hasil dari reformasi administrasi di bawah raja Chulalongkorn (r.1868-1910) ditahun 1890-an, kerajaan-kerajaan tradisional, yang menikmati status otonom, telah berubah menjadi provinsi di bawah kekuasaan langsung dari Bangkok.

Penggabungan daerah Patani Greater (lebih besar) ke dalam sistem administrasi Thailand pada tahun 1902 tidak

hanya tindakan politik sentralisasi kekuasaan oleh Bangkok, tapi apa yang lebih bermasalah dan menghancurkan adalah intervensi ke dasar masyarakat Islam dengan praktek Thai-Buddhis. Yang paling penting adalah penghapusan Syariah (hukum Islam) dan adat Melayu (hukum adat Melayu), yang merupakan dasar praktek Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum penggabungan wilayah Patani Raya, daerah itu diperintah oleh raja Melayu (raja). Meskipun berada dibawah kekuasaan raja Patani Thailand, raja masih memerintah berdasarkan Syariah dan Adat Melayu. Lembaga-lembaga penting Islam adalah masjid, dan pondok (sekolah agama). Masjid ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi serta sebagai tempat praktek keagamaan dan balai desa. Pondok ini merupakan pusat belajar bagi masyarakat.

Kedua lembaga sangat penting bagi keberadaan dan kesejahteraan bagi semua umat Islam. Pelaksanaan sentralisasi administrasi di wilayah ini pasti campur tangan dan diganti aturan lokal dan adat dengan peraturan pusat dan peraturan. Segera setelah itu, ruang provinsi menggantikan masjid lama, sebagai arti dari kedatangan pemisahan agama dari politik

Penghapusan Syariah datang sebagai hasil dari pelaksanaan undang-undang Thailand di semua daerah di bawah kedaulatan pemerintah pusat absolut. Reformasi hukum yang diperlukan sebelumnya bahwa hukum Islam yang berlaku di seluruh wilayah muslim diganti dengan hukum sekuler Thailand, kecuali untuk kasus-kasus keluarga dan warisan. Bahkan dalam kasus hukum keluarga dan warisan, keputusan hakim Muslim belum final sampai telah disetujui oleh hakim Thailand. Itu berarti hakim muslim di pengadilan reformasi, tidak seperti sebelumnya pada praktek, memiliki kekuatan sama sekali. Dan ketika kasus naik ke pengadilan tinggi, mereka harus menerima keputusan oleh seorang hakim Thailand yang bukan muslim. Ini terhadap kepercayaan Islam dan praktek.

Masyarakat Patani merasa dianiaya dan di bawah tekanan pembaharuan oleh mayoritas (misalnya, mereka dipaksa mengambil nama-nama Thai). Sangat tidak menyenangkan di Selatan dengan tidak adanya perhatian

pemerintah terhadap perasaan kebangsaan (Melayu) dan keagamaan penduduk. Pemerintah mencoba menghancurkan sekolah-sekolah Muslim dan menggantinya dengan sekolah Thai. Pemerintah juga mencoba menghancurkan sekolah-sekolah Muslim, tidak peduli terhadap perayaan-perayaan Islam, menganiaya, menahan dan kadang-kadang malah membunuh para pemimpin agama dan politik Muslim, sekitar lima ratus Muslim dibunuh oleh pemerintah di Selatan, dan terakhir tetapi tidak sepele, pemerintah memerintah Muslim untuk mengambil nama Thai yang non Muslim: demi menipisnya identitas Islam mereka.

Kebangkitan memuncak masyarakat Melayu Patani menentang kerajaan Thailand, Nik Anuar Nik Mahmud dalam bukunya menyatakan: "Tahun masehi 1902 adalah tahun yang malang sekali di dalam sejarah kejatuhan kerajaan Melayu Patani. Dengan kejatuhan itu, maka terhapus hak pertuanan orang-orang Melayu atas negeri Patani, tergadai semua hak kebebasan dan kemerdekaan mereka kepada Raja *Siam*".

Segala hak kekuasaan tertinggi masyarakat Melayu ke atas negeri Patani Darussalam dihapuskan semua. Sementara negeri Patani Darussalam milik orang Melayu telah dipecahkan kepada tujuh wilayah. Hakikatnya, rakyat Patani mengetahui bahwa dasar yang dilaksanakan bertujuan untuk melemahkan politik masyarakat Melayu Patani. Akibatnya, timbul pergolakan menentang dasar tersebut sehingga menimbulkan hasrat untuk kemerdekaan negeri Patani Darussalam.

Perjanjian telah menguatkan lagi cengkaman kerajaan Thailand terhadap masyarakat Melayu Patani. Oleh itu, kerajaan Thailand mengubal dasar dalam segenap aspek untuk melemahkan masyarakat agar tidak memberontak. Usaha kerajaan untuk melemahkan masyarakat Melayu Patani tidak berjaya apabila masih berlaku seri pemberontakan menentang kerajaan hingga ke hari ini.

Kemerdekaan merupakan tujuan utama masyarakat Melayu Patani dalam perjuangan mereka karena sejarah telah menunjukkan orang-orang Melayu Patani mempunyai negeri berdaulat tetapi telah dijajah oleh kerajaan Thailand. Tuntutan

terhadap kemerdekaan berlaku sekiranya wujud elemen-elemen yang menantang dan mengancam kedudukan bangsa Melayu. Persoalannya, isu kemerdekaan telah lama diperjuangkan oleh orang-orang Melayu Patani. Namun mereka masih lagi mengalami kekalahan dan kegagalan dalam menuntut hak ke atas tanah air sendiri. Ramai pejuang telah terkorban dan ramai juga nyawa dipihak kerajaan Thailand yang terkorban.

1. Konflik fase I (1960-1998)

Tidak lama sesudah muncul peraturan dari pemerintahan Thailand yang menghapuskan pesantren-pesantren di Thailand Selatan untuk mengadopsi kurikulum pendidikan berbau sekuler, grup BNPP, BRN dan PULO, dalam perkembangannya berhasil menarik minat masyarakat Patani karena selain melakukan perlawanan bersenjata, usaha grup BNPP BRN dan PULO, juga gencar melakukan aneka kegiatan sosial untuk meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan para penduduk lokal.

Situasinya mulai berubah setelah grup-grup tersebut sepakat untuk membentuk grup pemberontak bersama yang bernama bersatu & melakukan operasi militer bersama dengan kode sandi " Operasi daun Gugur" (*Operation Falling Leaves*). Seiring dengan semakin meningkatnya intensitas konflik sejak terbentuknya grup bersatu, Thailand pun melakukan sedikit perubahan strategi untuk meredam konflik. Lobi dengan pemerintahan Malaysia ditingkatkan di mana hasilnya, perdana menteri Malaysia saat itu setuju untuk melakukan kerja sama lintas perbatasan dengan aparat Thailand. Kerja sama tersebut berbuah manis bagi Thailand karena berkat kerja sama tersebut, tokoh-tokoh penting dari kelompok pemberontakan Thailand Selatan yang selama ini bersembunyi di Malaysia berhasil diringkus. Sebagai akibatnya, kekuatan Gerakan Bebasan Patani Bersatu pun mengalami penurunan tajam dan Thailand Selatan sempat memasuki periode damai untuk sementara waktu.

2. Konflik Fase II (2001-2004)

Kembalinya masa damai ke Thailand Selatan sempat

diikuti dengan pemberian otonomi khusus Patani dan pengacuran subsidi lebih dari Thailand pusat ke daerah Patani dengan harapan begitu kepentingan-kepentingan dari masyarakat Melayu Patani bisa terakomodasi, maka mereka tidak akan melakukan pemberontakan lagi. Walaupun pada awalnya kelihatan menjanjikan, aneka kebijakan pemerintah tersebut dalam prakteknya tidak diikuti dengan peningkatan kualitas infrastruktur yang memadai, penyerapan masyarakat Melayu Patani lokal ke dalam birokrasi, dan pemangkasan pengangguran yang ada di Thailand Selatan. Puncaknya adalah ketika pada tahun 2001, pemerintah pusat Thailand membubarkan badan otonomi khusus Thailand Selatan. Tidak mulusnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat Thailand dalam menangani masalah-masalah sosial di Thailand Selatan lantas diikuti dengan meletupnya kembali aktivitas pemberontakan. Di akhir tahun 2001, 5 aksi penyerangan terkoordinir yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang identitasnya tidak diketahui mengakibatkan 5 anggota polisi dan 1 relawan desa tewas. Tahun demi tahun berlalu, aksi-aksi penyerangan di Thailand Selatan terus mengalami peningkatan dari sekitar 75 kasus di tahun 2002 menjadi 119 kasus di tahun 2003.

Memasuki tahun 2004, intensitas konflik masih menunjukkan tren peningkatan. Para pelaku serangan juga mulai berani menargetkan target-target berpengalaman tinggi semisal pos tentara. Bulan Januari 2004 contohnya, sekitar 100 orang bersenjata menyerang pengkalan militer di Thailand Selatan dan merampas stok persenjataan yang tersimpan di dalamnya. Aksi serupa juga muncul di bulan maret dan April 2005 dimana dalam aksi-aksi tersebut, para pelaku berhasil mengamankan aneka persenjataan modern seperti senapan mesin, senapan serbu, bahan peledak.

Bulan April 2004 juga menjadi saksi dimana salah satu momen paling kontroversial dalam konflik di Thailand Selatan terjadi. Saat itu- tepatnya pada tanggal 28 April sekitar 100 orang anggota milisi menyerang 10 pos militer di Thailand Selatan. Serangan tersebut berhasil dipatahkan dan sebagian

dari para milisi tersebut kemudian lari bersembunyi di masjid kre Se, masjid yang sangat disakralkan oleh penduduk muslim lokal.

Para tentara yang mengejar milisi-milisi tersebut lalu menembaki masjid dan menewaskan milisi-milisi yang sembunyi di dalamnya. Peristiwa tersebut langsung memancing kemarahan dari para penduduk Muslim setempat sehingga sejak itu, konflik di Thailand Selatan pun semakin diwarnai oleh sentiment agama.

Momen kontroversial selama konflik di tahun 2004 belum sampai disitu. Bulan oktober 2004 di kota Tak-Bai, provinsi Narathiwat, para penduduk lokal berdemonstrasi menuntut dibebaskannya 6 kawan mereka yang sebelumnya ditangkap oleh aparat setempat karena dituduh menyediakan persenjataan untuk pasukan pemberontakan setempat. Respon aparat Thailand untuk meredam demonstrasi tersebut tidak main-main, bahkan terkesan berlebihan. Ratusan penduduk lokal ditangkap dan diikat sambil dipaksa menanggalkan pakaian bagian atasnya, lalu dimasukkan kedalam truk dalam kondisi berhimpit - himpitan untuk kemudian diangkut ke pos militer di provinsi Pattani. Merupakan peristiwa dimana nama 78 orang penduduk Islam kehilangan nyawa semasa dalam tahanan tentara Thailand, dalam bulan Ramadhan. Kejaman terhadap perilaku tentara Thailand pun langsung meledak, bukan hanya dari kalangan Muslim tapi juga dari golongan non-Muslim Thailand. Sidang untuk mengadili para tentara yang dituding bertanggung jawab atas insiden tersebut sempat dilangsungkan, namun para terdakwa ternyata hanya menerima vonis hukuman ringan. Lepas dari masih banyaknya mister yang menyelimuti insiden tersebut, insiden-insiden kontroversial yang melibatkan tentara Thailand tersebut pada akhirnya ibarat sumbu yang memicu konflik fase baru di Thailand Selatan. Konflik fase baru yang berskala jauh lebih besar.

3. Konflik Fase III (2005-sekarang)

Konflik di fase III ini ditandai dengan menjamurnya

kelompok- kelompok pemberontak separatis berideologi Islam yang baru terbentuk, misalnya Runda Kumpulan Kecil (RKK). Selain kelompok-kelompok baru tersebut, para "pemain lama" seperti kelompok BNPP, BRN dan PULO juga ibarat menemukan kembali tajinya pada periode ini. Jumlah anggota gerakan separatis pada fase ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan konflik fase-fase sebelumnya yang hanya melibatkan ratusan orang. Angka perkiraan menyebutkan bahwa jumlah orang yang terlibat dalam aksi-aksi penyerangan & vandalism pada fase ini berkisar antara 5.000 hingga 30.000 orang.

Di medan konflik sendiri, aksi-aksi vandalism yang dilakukan oleh gerakan separatis mengalami peningkatan pesat jika dibandingkan dengan konflik pada fase sebelumnya. Insiden beberapa buah bom meledakan di bandara, Supermarket, hotel dan tempat-tempat ramai. Selain melakukan aktivitas pemboman, para milisi pemberontak juga semakin sering melakukan aksi-aksi penembakan & pemotongan kepala kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, termasuk kepada para pemuka agama setempat.

Semakin gencarnya aktivitas para pemberontak lantas membuat pemerintah Thailand saat itu, Thaksin mengerahkan lebih banyak personel militer di area konflik. Total, ada sekitar 24.000 tentara & hampir 70.000 anggota milisi pro-pemerintah yang diterjunkan sejak tahun 2004. Namun, minimnya ketrampilan pasukan Thailand dalam metode-metode anti-teror & buruknya rasa saling pengertian dengan pendudukan lokal menyebabkan upaya para tentara untuk meredam konflik menjadi tidak efektif. Tak hanya itu, pihak tentara juga kerap bergesekan dengan otoritas polisi setempat karena keterlibatan sejumlah anggota polisi dalam sindikat narkoba Thailand Selatan.

Tahun demi tahun berlalu & selama periode itu, Thailand sempat beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan. Para pemimpin yang berkuasa tersebut juga sempat mengutarakan optimismenya bahwa konflik di Thailand Selatan bakal segera berakhir. Namun, fakta di lapangan menunjukkan

bahwa konflik belum juga menunjukkan tanda- tanda akan segera usai. Kalau melihat begitu rumitnya konflik di Thailand Selatan ini, pertanyaan klasik pun lantas meredak. Sampai kapankah Thailand Selatan akan terus menjadi arena konflik dan pertempuran darah? Tak ada yang tahu pasti jawabannya. Semoga saja pihak-pihak yang berkonflik bisa segera menemukan solusi akhir bagi masalah mereka, walaupun tampaknya hal tersebut bakal sulit terwujud dalam waktu dekat. Waktu & Lokasi Pertempuran: Waktu : 1960-sekarang. Lokasi: Thailand Selatan (Pattani, Narathiwat dan Yala). Pihak yang bertempur: Negara: Pemerintah Thailand melawan - Grup : BNPP, BRN dan PULO Milisi-milisi anti-Thailand. Sebagian kecil bertentangan agama Budhis dengan Melayu Patani (saling membunuh). Hasil Akhir: Belum diketahui, konflik masih berlangsung hingga sekarang. Korban jiwa: Sejak konflik tahun 2004-sekarang *deepsouth wabt* melaporkan jumlah korban mencapai 17,652 korban jiwa dan 11,366 orang lainnya mengalami cedera akibat konflik yang berkepanjangan ini.

Munculnya Gerakan-gerakan Separatis

Di Thailand, masyarakat Melayu Patani merupakan golongan minoritas yang paling besar di negara itu. Masyarakat Melayu Patani di Thailand Selatan memiliki identitas, etnis, dan agama, berbahasa Melayu dan agama Islam yang berbeda dengan mayoritas Budhis. Sejarah politik mereka secara definitif dimaksud ke dalam kerajaan Thailand dalam sekitar tahun 1902, penuh protes dan pemberontakan selalu. Tahun 1964 merupakan simbol yang paling memberi inspirasi kepada mereka dan berfungsi sebagai tujuan yang mereka kerja. Meneliti kembali peran Islam dalam kebangkitan nasionalisme etnis Melayu di dalam konteks percaturan politik nasionalisme wilayah negara Thailand.²³

Adapun nasionalisme merupakan suatu pemikiran dan tindakan yang menunjukkan kecintaan terhadap bangsa dan tanah air serta kesadaran nasional yang meliputi politik,

²³ Surin pitsuwan, Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani, (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm.12.

ekonomi, sosial, kebudayaan, dan keagamaan bahkan ingin keluar dari sesuatu penguasaan asing dalam mengekalkan identitas, juga nilai-nilai kebangsaan sendiri.

Keterpaksaan masyarakat Melayu Patani berintegrasi dengan gaya hidup masyarakat Thailand yang beragama Budha, dirasakan selama puluhan tahun. Terutama sejak menjadi bagian dari kerajaan Thailand. Penggunaan bahasa Thailand wajib digunakan di kantor pemerintah, sekolah, dan media massa.

Mulai pada tahun 1980-an, dalam suasana politik bebas di bawah sistem pemerintahan demokrasi Thailand, di tengah-tengah masyarakat Melayu Patani mulai muncul gerakan-gerakan dalam memperjuangkan untuk mengembalikan hak-hak kedaulatan mereka. Perjuangan yang beroreintasi kepada agama dan bangsa yang berperan secara aktif dan terbuka. Lahirnya gerakan separatis bersenjata untuk memisahkan diri, yang tergabung dalam organisasi - organisasi seperti, Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP), Barisan Revolusi Nasional (BRN) dan *Patani United Liberation organization* (PULO). secara umumnya gerakan separatis tersebut membawa simbol keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan sebagai asas dan tujuan utama.

Tiga Organisasi utama itu sangat berpengaruh bagi administrasi Bangkok, yang begitu menentukan arah dan kebijakan dalam administrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Terdapat tiga poin utama dari ketiga organisasi besar itu, yang menjadi pengawasan pemerintah, pertama, penentuan kebijakan Kedua, tanggung jawab atas urusan politik, yang diharapkan akan menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi gerakan. Ketiga, yang paling tinggi adalah menentukan pimpinan militer (jabatan tentara), yang merupakan puncak hirarki yang paling menarik dan memiliki peran aktif, karena merupakan tulang punggung gerakan separatis ketiga organisasi tersebut.²⁴

Aksi tindakan perjuangan baru setelah sekian lama

²⁴ Surin pitsuwan, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, (Jakarta : LP3ES, 1989), hlm.175-176.

tenggelam dalam arus politik Thailand mulai muncul kembali sejak tahun 2004 M, sampai kini kawasan Thailand Selatan terus bergolak. Akar permasalahannya tidak lagi sebatas konflik identitas (bangsa), tetapi mencakup benturan agama dan kebudayaan. Pemerintah Thailand berusaha mengsiamkan orang Melayu Patani, sementara masyarakat Melayu Patani dengan identitas budaya dan agamanya sangat berbeda dengan masyarakat Thai-Budha.

Dasar-dasar Gerakan

1. Patani *Darul Harbi*: Karena telah dijajah oleh kafir Siam, perang di negara Darul Harbi adalah fardhu „ain, ini telah disepakati oleh seluruh Ulama Islam, 4 Mazhab mengatakan bahwa: "Jihad untuk kemerdekaan adalah fardhu „ain untuk seluruh laki-laki dan perempuan di negara Patani Darussalam yang dikacaukan, dijajah, ditindas dan diniaya".
2. Piagam PBB telah menetapkan bahwa untuk setiap bangsa terjajah, memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, serta meningkatkan pengakuan atas hak asasi manusia dan dasar kebebasan bagi semua orang, sehingga gerakan kemerdekaan nasional lahir di seluruh dunia,
3. Berdasarkan subyek di atas, kaum Muslimin di Patani bangkit untuk melakukan kewajiban membebaskan tanah air mereka yang dijajah dan masyarakat Melayu Patani tertindas dari penjajah terkutuk, maka gerakan kemerdekaan Patani adalah gerakan yang dibuat fardhu (diwajibkan) untuk semua Muslim Melayu Patani.
4. Jika ada orang dari kalangan orang Melayu Patani yang bersekongkol dan mendukung bangsa penjajah *Siam*, serta memberikan pengakuan kepada raja dan ratu *Siam* sebagai "ayah dan ibu" dan "dengan ikhlas mengklaim bahwa ia adalah orang Thailand, keturunan Thailand dan berkebangsaan Thailand", maka orang ini adalah *RADDAH* (murtad), memberontak agama, bangsa dan tanah air.

Walaupun banyak gerakan separatis ditubuhkan namun kemerdekaan yang ingin dicapai belum lagi berjaya. Malahan telah menimbulkan isu-isu lain seperti diskriminasi dan

ketidakadilan ke atas identitas, budaya, agama dan ekonomi terhadap masyarakat Melayu Patani oleh kerajaan Thailand. Isu-isu ini timbul ekoran dari pada tindak balas kerajaan dalam memastikan kepentingan atau keinginan masyarakat Patani untuk merdeka tidak dapat dicapai. Justru itu, benturan antara kedua belah pihak yang bertindihan kepentingan ini tanpa pengurusan yang baik akan mengembangkan lagi situasi konflik.

Analisis Konflik dalam Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan

Konflik merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah interaksi di antara dua pihak. Ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan berkonflik. Diantaranya adalah masalah ketimpangan yang menimbulkan kecemburuan terhadap pihak tertentu, yang meliputi ketimpangan sosial, sejarah, politik dan agama. Adanya ketimpangan-ketimpangan tersebut menyebabkan adanya keinginan masyarakat didalam suatu negara untuk mempunyai suatu bentuk negara sendiri. Dan keinginan tersebut ditunjukkan dengan adanya gerakan-gerakan separatis dan pemberontakan oleh masyarakat yang merasa dirinya dirugikan.

Faktor-faktor Penyebab Konflik

1. Faktor Sejarah

Tahun masehi 1902 adalah tahun yang malang sekali di dalam sejarah kejatuhan kerajaan Melayu Patani. Dengan kejatuhan itu, maka terhapus hak pertuanan orang-orang Melayu atas negeri Patani Darussalam, tergadai semua hak kebebasan dan kemerdekaan mereka kepada raja *Siam*²⁵ Penggabungan daerah Patani *Greater* (lebih besar) ke dalam sistem administrasi Thailand pada tahun 1902 tidak hanya tindakan politik sentralisasi kekuasaan oleh Bangkok, tapi apa yang lebih bermasalah dan menghancurkan adalah intervensi ke dasar masyarakat Islam dengan praktek Thai-Buddhis. Yang paling penting adalah penghapusan Syariah (hukum Islam) dan

²⁵ Nik Anuar nik mahmud, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, (Universiti Kebangsaan Malaysia).

adat Melayu (hukum adat Melayu), yang merupakan dasar praktek Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum penggabungan wilayah Patani Raya, daerah itu diperintah oleh raja Melayu (raja). Meskipun berada dibawah kekuasaan raja Patani Thailand, raja masih memerintah berdasarkan Syariah dan Adat Melayu. Lembaga-lembaga penting Islam adalah masjid, dan pondok (sekolah agama). Masjid ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi serta sebagai tempat praktek keagamaan dan balai desa. pondok ini merupakan pusat belajar bagi masyarakat.

Pada 9 Juli 1909 pihak British yang diwakili oleh gubernur negeri-negeri selat telah berjumpa dan berbincang dengan kerajaan *Siam* di Bangkok. Tujuan perjumpaan tersebut diadakan adalah supaya kedua belah pihak dapat berjumpa dan membicarakan langkah-langkah yang patut diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah negeri yang dihadapi oleh Semenanjung Tanah Melayu. Pada masa tersebut, kerajaan *Siam* masih lagi menjajah dan mentadbir negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pattani, Narathiwat dan Yala. Setelah perjumpaan tersebut, kerajaan *Siam* telah bersetuju untuk menandatangani perjanjian Bangkok 1909 yang mengatakan bahwa kerajaan *Siam* akan menyerahkan Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan kepada pihak British manakala Pattani, Narathiwat dan Yala masih kekal lagi di bawah pemerintahan kerajaan *Siam*. Kerajaan *Siam*, walaupun perjanjian *Anglo - Siam* menyebabkan kehilangan negeri-negeri di tanah Melayu seperti Kedah, Terengganu, Kelantan dan Perlis. Tetapi *Siam* mendapatkan berjaya mengekalkan negeri Patani dan setun dalam kekuasaannya. Perjanjian itu sebagai pengiktirafan resmi Inggris terhadap kekuasaan dan kedaulatan *Siam* ke atas dua negeri tersebut, disamping dapat mempertahankan kedaulatan adalah kejayaan yang hakiki dibandingkan dengan negeri-negeri lain di Asia Tenggara yang menjadi mangsa penjajahan barat pada waktu itu.

Pada hakikatnya perjanjian ini tidak direstui oleh masyarakat Melayu penduduk setempat yang terlibat, terutama

Patani dan Setun.²⁶ Maka dalam perjanjian ini membuat kepada kelompok orang Melayu tidak setuju atas perjajian tersebut. Oleh karena itu munculnya respon dalam bentuk perlawanan dari pihak masyarakat Melayu Patani yang dipimpin oleh Tengku Abulqadir Kamarudeen dalam upaya untuk mempertahankan identitas Melayu Patani dari cengkaman penjajah *Siam*.

2. Faktor Agama

Ada juga yang menuding bahwa sikap para pegawai Thailand di pejabat-pejabat daerah mengamalkan diskriminasi terhadap penduduk yang beragama Islam. Mereka dikatakan tidak mau menghormati adat, perasaan dan kehendak rakyat setempat. Hal ini dikatakan telah menjadi satu lagi puncak kepada pergolakan di Thailand Selatan yang semakin berterusan. Pihak polisi kerajaan dituduh menjalankan operasi serang hendak terhadap para imam dan guru-guru agama kerana dicurigai mereka menyebarkan sentimen- sentimen anti-kerajaan. Oleh karena itu wujud gerakan separatis di Thailand Selatan merupakan gerakan separatis terbesar dan paling aktif terus aktif.

Tujuan utama organisasi gerakan separatis adalah untuk menjadikan wilayah Patani sebagai suatu wilayah Islam di samping menentang tindakan oleh Thai-Buddhist yang ingin menghapuskan penduduk Islam dan Muslim. Gerakan separatis menuntut kuasa otonomi di wilayah Patani dari pada kerajaan Thailand para penduduk beragama Islam menuding pihak polisi Thailand menculik dan membunuh guru-guru agama dan imam-imam di kampung mereka. Oleh karena itu, mereka telah mengambil inisiatif sendiri dan membekalkan guru-guru tersebut dengan senjata api sebagai langkah mempertahankan diri mereka. Kumpulan- kumpulan penjenayah kecil- kecilan pun dituduh telah mengambil kesempatan dan membunuh para pegawai polisi yang menghalang aktivitas-aktivitas haram mereka dan menuduh perbuatan tersebut atas para

²⁶ Abdulrahman Daud, *Sejarah Negara Fathoni Darussalam*, (Teluban: tidak cantum cetakan dan tahun), hlm. 80.

pemberontak beragama Islam faktor ketidak seimbangan ekonomi dan kuasa politik masalah kemiskinan dan ekonomi juga telah dikatakan merupakan antara satu faktor yang menjadi puncak kepada konflik di Thailand Selatan. Pada keseluruhannya, penduduk yang beragama Islam memiliki pendidikan yang jauh lebih rendah dari pada para penduduk beragama Buddha. Sebanyak 69.8% populasi beragama Islam hanya memiliki pendidikan sekolah rendah saja berbanding dengan 49.6% populasi beragama Buddha. Sementara hanya 9.2% populasi beragama Islam telah menghabiskan pelajaran mereka di tahap sekolah menengah berbanding dengan 13.2% populasi beragama Buddha.

Aliran persekolahan di Thailand Selatan semuanya menggunakan bahasa Thai sebagai bahasa pengantar, oleh karena itu lahirnya perasaan tidak puas hati di kalangan penduduk sehingga ada yang tidak membenarkan anak mereka bersekolah disebabkan oleh bahasa *Thai* yang digunakan itu. Keadaan menjadi semakin parah karena lebih dari 1,200 guru dan pegawai pendidikan telah memohon agar dapat ditukarkan kepada kawasan yang lain akibat takut dibunuh oleh kumpulan-kumpulan pemisah tersebut. Di samping itu, sebanyak 1,000 sekolah juga terpaksa ditutup akibat orang tua siswa yang tidak mau menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerana takut akan masalah keganasan yang melanda kawasan Selatan itu. Para penduduk yang beragama Islam juga tidak dapat menikmati peluang pekerjaan sebanyak mana yang dinikmati oleh golongan penduduk yang beragama Buddha.

Para pegawai kerajaan merangkumi hanya sebanyak 2.4% pekerja Muslim berbanding dengan 19.2% pekerja yang beragama Buddha. Peluang pekerjaan di sektor swasta pula susah direbut oleh para gradual beragama Islam yang tidak menerima bahasa Thailand atau sistem pelajaran Thailand secara langsung.

Hubungan mayoritas dan minoritas yang tidak harmonis. Agama Islam merupakan agama minoritas penduduk Thailand. Kondisi ini seringkali melahirkan hubungan yang tidak harmonis antar pemeluk agama mayoritas Budha dengan

pemeluk agama minoritas. Potensi konflik terjadi apabila setiap kelompok mencurigai kegiatan penyebaran agama masing-masing.

3. Faktor Politik

Dalam konflik yang terjadi dapat ditemui bahwa konflik umumnya berakar pada latar belakang politik, maupun berasal dari kebijakan yang tidak adil. Disisi lain, ketidak seimbangan alokasi sumber daya telah mendorong rasa ketidakadilan yang berujung pada konflik. Sementara, isu agama, etnis, maupun separatis, merupakan faktor pemicu yang membungkus konflik terus berkepanjangan. Dalam situasi politik, hampir seluruh fungsi-fungsi pemerintah tidak dapat berjalan efektif.

Pegawai-pegawai negeri, pemimpin-pemimpin provinsi dan pemimpin-pemimpin daerah di Patani itu kebanyakan dikuasai oleh orang-orang yang dari luar provinsi dan orang beragama Budha. Hal ini sudah dibuktikan dan ada fakta kenyataan bahwa pada 3 provinsi di Thailand Selatan dikuasai oleh orang beragama Budha, dan akan menunjukkan tidak adanya kesempatan bagi masyarakat Melayu Patani untuk mereka bisa mengurus diri mereka sendiri ataupun setidaknya harus adanya pegawai-pegawai negeri, pemimpin-pemimpin provinsi dan pemimpin-pemimpin daerah di Patani yang beragama Islam. Hal ini sangat mengecewakan masyarakat di Patani.

Politik asimilasioner yang berlebihan dari pemerintahan Thailand menyebabkan terancamnya identitas Melayu. Dalam upaya (*nation building*) pemerintah Thailand menggunakan strategi asimilasioner yang berlebihan kepada rakyatnya. Bagi bangsa Melayu Patani, cara-cara represif merupakan simbol penolakan identitas Melayu mereka, karena pemerintah Thailand menghendaki satu masyarakat Melayu Patani dengan identitas Thailand. Pendekatan militer semakin menjauhkan tujuan integrasi yang hendak dibangun. Penyeragaman tersebut menyebabkan masyarakat Melayu Patani secara sistematis dimarginalkan dari *main stream* politik, sosial, ekonomi Thailand Selatan. Cara-cara represif yang dilakukan untuk mencapai

tujuan tersebut membuat masyarakat Melayu Patani merasa teragregasi ke dalam kutub yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah. Keterpaksaan masyarakat Melayu Patani berintegrasi dengan gaya hidup masyarakat Thailand yang beragama Budha, dirasakan selama ratusan tahun. Terutama sejak menjadi bagian dari kerajaan Thailand. Penggunaan bahasa Thai wajib digunakan di kantor pemerintah, sekolah, dan media massa.

Contoh pemerintah tidak mendukung penggunaan bahasa Melayu, apa lagi mengajarkannya sekalipun sebagai bahasa kedua di sekolah-sekolah. Pemerintah Thailand berusaha menghapus identitas, sejarah, agama masyarakat Melayu Patani. Secara garis besar terdapat 3 bidang yang menjadi sasaran pemerintah Bangkok dalam menjalankan kebijakan asimilasi, yaitu :

1. Di bidang hukum strategi yang ditempuh pemerintah menerapkan hukum kerajaan sebagai landasan hukum masyarakat Patani, perombakan struktur pengadilan, serta penerjemahan dan pengkodifikasian hukum Islam agar tercipta keseragaman dan konsistensi dalam penerapannya.
2. Di sektor pendidikan yaitu dengan melarang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk diganti dengan bahasa Thai, mengharuskan pondok menerapkan pendidikan sekuler/ sebagai sekolah swasta untuk pendidikan Islam.
3. Di bidang budaya adalah diciptakannya konsep kebudayaan Thai Rahnium atau mandat kebudayaan *wiraihan* yang merupakan perundang-undangan nasional mengenai keberanian rakyat Thai. Penguatan pilar-pilar ideologi "Bangsa, Agama, dan Raja" melalui perlunya kekuasaan absolut pemerintah Thailand guna menanamkan persatuan bangsa Thai.

4. Faktor Sosial

Di samping dasar yang ditentukan di pusat yang dilihat tidak mengambil pandangan dan sensitivitas mereka, pegawai pusat beragama Buddha juga tidak pernah mau tahu atau

memahami adat istiadat mereka. Sebaliknya, penduduk Islam berkenaan merasakan bahwa mereka telah banyak berkorban dengan menukar nama dengan nama Thailand, bertutur dalam bahasa Thailand serta menghantar anak ke sekolah Thailand. Meskipun, kerajaan pusat pernah berjanji untuk membangunkan kawasan Thailand Selatan dalam usaha meningkatkan taraf sosiol-ekonomi penduduk terlibat, janji ini hanya tinggal janji.

Dalam tatanan sosial, orang-orang Melayu Patani mendapatkan julukan yang kurang enak untuk didengar. Yaitu *khæk* yang berarti orang luar/tamu, yang secara harfiah berarti pendatang atau orang yang datang menumpang. Dalam bahasa Thailand, istilah ini juga selama berabad-abad sudah dikenal untuk menyebut kaum pendatang berkulit hitam dari daerah Melayu dan Asia Selatan, orang-orang Melayu Patani menolak sebutan ini dan menyatakan bahwa kedatangan mereka (khususnya di kawasan Thailand Selatan), jauh lebih awal dari pada kedatangan orang-orang Thai- Budha.

Selain itu juga dapat dikesan sedikit unsur-unsur konflik hubungan yaitu konflik yang berlaku antara kumpulan majoritas dan kumpulan minoritas akibat perasaan negatif dan kurang mempercayai antara kedua- dua kumpulan majoritas dan minoritas. Kumpulan majoritas yang diperkatakan di sini adalah pihak kerajaan Thailand dan pihak kumpulan pemisah pula adalah kumpulan minoritas Akibatnya, wujud perbezaan taraf hidup yang signifikan antara penduduk Islam dengan sebagian besar rakyat beragama Buddha. Aspek budaya yang turut menunjangi konflik ini adalah seperti hak penggunaan bahasa Melayu dan adat Melayu oleh majoritas penduduk di wilayah Selatan. Majoritas yang berbangsa Melayu dan beragama Islam merupakan bahasa ibunda mereka itu dapat dikekalkan, kerana ia merupakan identitas mereka.

Konflik Thailand Selatan ini pada awalnya merupakan satu konflik kepentingan dimana isu tanah yang substantif dijadikan isu pendapat antara pihak kerajaan Thailand dengan pihak gerakan-gerakan separatis yaitu gerakan-gerakan separatis yang menginginkan kemerdekaan dari negara Thailand tetapi

tidak dibenarkan oleh pihak kerajaan Thailand. Namun begitu, konflik ini menjadi semakin susah diselesaikan kerana konflik kepentingan tersebut mulai bercampur dengan konflik nilai. Maksud konteks konflik nilai ini adalah usaha kerajaan Thailand beragama Buddha yang ingin mengasimilasikan kesemua penduduk Thailand termasuk mereka yang beragama Islam. Pihak kerajaan Thailand tidak membenarkan penduduk beragama Islam untuk mengembangkan nilai dan budaya mereka dan ini yang mewujudkan konflik.

Campuran kesemua jenis konflik ini yang menjadikan konflik Thailand Selatan menjadi satu konflik yang amat sukar diselesaikan dan dijangkakan tidak akan dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat ini. pengabaian hak asasi manusia satu lagi yang menjadi puncak kepada pergolakan di Thailand Selatan ini merupakan keganasan dan pengabaian hak-hak asasi manusia di Thailand Selatan.

Upaya-upaya Yang dilakukan Pemerintah Thailand

Konflik yang sedang berlaku di Patani ini sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab bagi pemerintah Thailand untuk menyelesaikannya dengan mencari resolusi yang tepat bagi masyarakat di Patani. Dalam hal ini upaya pemerintah melakukan resolusi konflik di Patani terbagi menjadi dua.

1. Internal

- a) Pembentukan Komisi Rekonsiliasi Nasional (*National Reconciliation Commission*) 2004. Upaya rekonsiliasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat dalam dua belas tahun terakhir, dengan terbentuknya Komisi Rekonsiliasi Nasional yang mengantarkan dan memediasi perdamaian di Thailand Selatan. Bertugas menjadi jembatan antara pemerintahan lokal dengan Melayu Patani dikendalikan dan diorganisir oleh sejumlah organisasi seperti BNPP, BRN dan PULO. Ketiga organisasi ini merupakan organisasi yang menginginkan kemerdekaan. Kuatnya peran militer di Thailand Selatan, membuat banyak rekomendasi komisi tidak bisa dijalankan. Pendidikan, Pekerjaan dan fasilitas pemerintah lainnya tetap saja tidak

leluasa dinikmati bagi masyarakat Melayu Patani. Persyaratan pemakaian ketat bahasa nasional Thailand dan sikap yang mencerminkan nasionalisme pro kebijakan pusat menjadi penghambat rekonsiliasi yang telah dilakukan baik oleh lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan komisi rekonsiliasi.

- b) Pemerintah Thailand telah mengeluarkan undang-undang darurat militer yang diberlakukan di tiga provinsi yakni Pattani, Narathiwat dan Yala itu sejak bulan agustus 2005. Undang-undang darurat yang hubungan dengan keamanan nasional dan pemerintah Thailand mengendalikan kekuatan militer untuk menghadapi pemberontak- pemberontak di Thailand Selatan. Aturan baru ini membuat militer memiliki kekuasaan lebih besar untuk mengendalikan negara, termasuk meredam demokrasi, HAM dan keadilan di Thailand Selatan dibawah undang-undang pasal 44 itu, pihak militer berhak menghukum warga yang dinilai mengancam keamanan nasional dan melakukan penghinaan terhadap kerajaan. Para terpidana tidak berhak melakukan banding. Lebih dari itu, militer juga mencabut hak berkumpul dalam satu tempat lebih dari lima orang. Pasal itu memberi kewenangan pada kepala junta untuk menjalankan kekuasaan eksekutif dalam hal keamanan nasional tanpa harus melalui persetujuan parlemen.

Mengenai hak di depan pengadilan, Prayut mengatakan bahwa pengadilan militer tetap berwenang mengurus tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan nasional. Namun terpidana akan berhak mengajukan banding. Tentara juga terus diberi wewenang untuk melakukan penangkapan seseorang atau kelompok tanpa perlu surat perintah penangkapan. Tentara akan diizinkan menangkap seseorang tanpa surat perintah penangkapan, Jika terjadi insiden jelas perdana menteri Prayutchan- osha. Selaian itu, ketentuan ini akan memberikan pemimpin junta alias Prayutchan sendiri, kekuasaan mendeklarasikan ancaman keamanan nasional atau bagi monarki. Pemerintah akan tetap melarang perkumpulan politik

dan mengizinkan militer menyalir area.²⁷ Ada Sekitar 65.000 tentara, para militer dan polisi ditempatkan di kawasan Thailand Selatan. Selain itu, militer juga mempersenjatai kelompok lokal Budha dan memberi pelatihan senjata kepada sekitar 80.000 relawan.

Pandangan masyarakat Patani terhadap undang-undang darurat pada warga masyarakat sipil, banyak warga Patani yang diculik, disiksa dan dibunuh 80 persen korban kekerasan adalah warga sipil, "Setiap hari, ada saja warga Patani yang ditembak tentara."²⁸ Militer bertindak di bawah undang-undang darurat dan undang-undang khusus lain, sehingga mereka luput dari sanksi hukum. Pembunuhan warga sipil selalu terjadi, pihak junta militer hanya membayar kompensasi atas keluarga korban. Diskriminasi, pembantaian kejahatan dan membayar kompensasi untuk keadilan adalah "paket layanan". Sejak sebelas tahun terakhir ada berbagai kasus yang tidak tuntas tentang pembunuhan ilegal, penyiksaan dan penculikan. Banyak orang diculik dan menghilang. Tidak ada pelaku yang dikenakan sanksi.

Proses perdamaian Patani melalui komisi rekonsiliasi nasional antara organisasi-organisasi gerakan separatis dengan pemerintah Thailand membuka pintu perubahan untuk warga Patani dan pemerintah Thailand dalam suatu wadah. Dengan demikian proses perdamaian yang hakiki dan berpijak pada beberapa nilai yang mampu membawa perubahan sosial politik. Kebijakan-kebijakan pemerintah tidak dapat mengadopsi berbagai nilai dalam masyarakat politik (*political society*) Patani yang mayoritas muslim.

Upaya Komisi rekonsiliasi nasional dan proses dialog perdamaian antara pemerintah Thailand dengan organisasi-organisasi gerakan separatis berlangsung beberapa kali namun tidak begitu tampak resolusi yang mampu menyelesaikan masalah konflik. Justru berdampak kepada upaya-upaya kekerasan, mulai dari kekerasan bersenjata maupun kekerasan

²⁷ <http://dangerofpatani.blogspot.co.id/2015/04/mengganti-uu-darurat-ke-pasal-44-bikin.Htm>

²⁸ Wawancara Hassan, warga sipil, kepada Islampos, 17 february 2016.

fisik lainnya.

Dengan terbentuknya komisi rekonsiliasi nasional malah membuat konflik semakin panas. Pemerintah pusat dianggap tidak lagi pada zona netral dalam upaya mencegah konflik berlanjut. Pemerintah dianggap sengaja membuat konflik semakin meluas. Disatu sisi kalangan separatis tidak ingin konflik berakhir karena semakin lama berkonflik maka dana pemerintah semakin besar kepada pihak pemerintah di Thailand Selatan.

Dengan demikian, dapat dianalisis juga sejauh mana kebijakan pemerintah Thailand atas undang-undang darurat militer untuk menyelesaikan konflik, konflik yang terjadi dapat kita temui bahwa konflik umumnya berakar pada latar belakang politik, maupun berasal dari ketidakadilan, dan penggunaan kekuatan (*force*) oleh negara yang bersangkutan dalam penanganannya, yang kerap kali berpotensi besar mengarah pada penyalahgunaan kekuatan militer yang tidak proporsional. Demikian, sebagaimana di Thailand dengan kebijakan pendekatan undang-undang darurat yang mempunyai kewenangan bagi pemerintah pusat mengarahkan kekuatan militer menangani konflik di Thailand Selatan. Juga karena gaya kepemimpinannya yang keras dan pendekatannya yang militeristik dalam menghadapi gelombang protes di Thailand Selatan. Jadi penggunaan kekuatan yang tidak proporsional tersebut menimbulkan jatuhnya korban di kalangan warga masyarakat Patani dan kebanyakan pihak sipil, baik luka-luka maupun kematian yang berlanjut di Thailand Selatan. Masalah-masalah agama, sosial, etnis dan sejarah merupakan faktor pemicu yang melatarbelakangi konflik terus berkepanjangan. Dalam situasi dan kondisi konflik, hampir seluruh fungsi-fungsi pemerintah tidak dapat berjalan efektif.

Tidak hanya itu, pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan seperti mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi para Melayu patani yang dituduh mendalangi serangan di Thailand Selatan. Selanjutnya, pemerintah juga menginstruksikan untuk menyita semua bahan peledak dan melakukan penyebaran tentara dan polisi bersenjata berat di

wilayah Patani. Kendati demikian, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Thailand bukanlah sebuah solusi yang baik. Kebijakan tersebut justru semakin meningkatkan ketegangan dan membuat suasana semakin rumit serta menimbulkan ketakutan dan kepanikan warga Patani. Pada akhirnya, hingga saat ini konflik masih terus terjadi dan belum ada satu formula pun yang dapat meredam dan mengakhiri konflik tersebut. Semakin lama berkonflik maka dana, pangkat dan lain-lain semakin besar kepada pihak militer.

2. Eksternal

- a) Perundingan Damai di Istana Bogor Indonesia pada tahun 2008. Salah satu perkembangan penting dalam penyelesaian konflik dengan keterlibatan eksternal terjadi pada 21 September 2008 bertempat di Istana Bogor. Pemerintah Thailand berunding dengan organisasi gerakan separatis dan menyatakan komitmen mereka untuk mengakhiri konflik yang mengorbankan ribuan nyawa dan harta benda yang tak sedikit. Pemilihan Indonesia sebagai fasilitator juga tak terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang sedikit banyak mempengaruhi opini dan meningkatkan kepercayaan pemerintah Thailand dengan rakyatnya di provinsi di bagian Thailand Selatan.

Dalam kaitan dengan posisi Indonesia, peranan yang bisa dimainkan Indonesia adalah melibatkan diri sebagai mediator atau fasilitator antara organisasi gerakan separatis dengan pemerintah Thailand dengan memaksimalkan alasan *affective*. Kondisi yang harus dipenuhi sebelum melibatkan diri adalah kesediaan Thailand untuk menerima peran tersebut. Aspek ini sangat krusial karena Indonesia, seperti kebanyakan negara berdaulat lain yang menghormati prinsip kedaulatan, adalah menjaga *conventional wisdom* dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Dengan demikian, kesediaan pemerintah Thailand adalah *condition sine qua non* yang harus terpenuhi. Tanpa kondisi ini Indonesia tidak mungkin dapat melakukan peran konstruktif dalam

penyelesaian damai konflik di Thailand Selatan. Dalam konflik Thailand Selatan, Indonesia sudah berhasil mempertemukan kedua belah pihak dan bersama-sama mencari solusi atas konflik yang sedang terjadi. Sebelum pertemuan yang dilakukan di Istana Bogor, berbagai pertemuan dan persiapan dilakukan. Pertemuan pertama di Pinang, kemudian dilanjutkan di Kedah dan Langkawi Malaysia.

- b) Penandatanganan Kesepakatan Damai di Kuala Lumpur Malaysia 2013. Negara Malaysia yang menjadi tuan rumah dalam kesepakatan awal pembicaraan dialog nantinya diharapkan kesepakatan damai dapat terlaksana dengan baik. Kesepakatan pembicaraan awal perdamaian antara pemerintah Thailand dan Melayu Patani diharapkan akan menghasilkan kesepakatan menuju perdamaian yang diharapkan kedua belah pihak. Penandatanganan kesepakatan awal tersebut adalah sebagai tahap awal dari sebuah proses yang panjang dan memerlukan waktu yang cukup panjang pula dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul nantinya.

Pembicaraan awal dalam kerangka perdamaian di antara Melayu Patani dan Pemerintah Thailand merupakan pertemuan pertama kalinya secara formal yang melibatkan pihak ketiga bagi membicarakan proses perdamaian di wilayah Thailand Selatan yang terus bergojak semenjak tahun 1960-an. Pada tahun 2004 intensitas konflik di wilayah Thailand Selatan semakin meningkat yang mengakibatkan pengerahan militer Thailand di wilayah Thailand Selatan semakin besar. Sebagai fasilitator, Malaysia telah mengambil peran yang sangat strategis dalam upaya membawa kedua belah pihak ke meja perundingan. Pada proses perundingan pada putaran pertama ini akan dibicarakan bagaimana soal kerja sama bisa dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa.

Atas permintaan resmi Thailand kepada Malaysia untuk dapat berperan sebagai fasilitator dan upaya mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Thailand meminta kepada pemerintah Malaysia untuk memfasilitasi pembicaraan antara

kelompok-kelompok Melayu Patani yang beroperasi di Thailand maupun di Malaysia. Untuk tahap awal pihak pemerintah Malaysia berhasil mempertemukan kelompok Melayu Patani untuk berbicara secara langsung dengan pemerintah Thailand yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 28 Februari 2013 lalu. negara Malaysia yang berbatasan langsung dengan negara Thailand di utara wilayahnya (Kelantan, Perlis dan Kedah) tentu berupaya untuk turut serta dalam mempertemukan pihak-pihak yang bertikai baik Melayu Patani dan Pemerintah Thailand. Sebagai negara tetangga, tentu pemerintah Malaysia akan menjaga hubungan baik dan tidak mengintervensi atas kedaulatan Thailand, yang mana pejuang-pejuang Muslim Patani sebagian besarnya mendiami wilayah Thailand Selatan dan Malaysia Utara seperti halnya di Kelantan yang wilayahnya sangat dekat dengan wilayah Patani.

Upaya-upaya pemerintah Thailand secara eksternal dalam proses perdamaian, Indonesia dan Malaysia menjadi mediator dan fasilitator untuk kedua belah pihak dalam perdamaian, pemerintah Thailand bersedia melakukan kesepakatan dengan Indonesia dan Malaysia. Hal ini dijalankan karena Thailand memiliki tujuan yang hendak dicapainya, yakni agar gerakan separatis dapat diatasi karena dalam prakteknya Thailand tidak dapat mengatasi sendiri konflik tersebut. Bahkan upaya-upaya yang ditempuh pun masih belum signifikan mengatasi organisasi-organisasi gerakan separatis. Oleh sebab itu, agar kepentingan Thailand tersebut dapat terpenuhi, maka hal-hal yang tidak dapat dilakukan sendiri dapat dipenuhi dengan melakukan hubungan dengan Indonesia dan Malaysia.

Sedangkan Indonesia dan Malaysia bersedia membantu karena Indonesia dan Malaysia perihatin dengan keadaan yang terjadi di Thailand Selatan, selain itu juga untuk memperbaiki hubungan bilateral dan menghilangkan berbagai macam tuduhan akibat dampak konflik yang turut dialami Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia tentu tidak dapat mengatasi gerakan separatis jika tidak melakukan kebijakan yang sama dengan Thailand, yakni keduanya sama-sama bersedia melakukan kunjungan dan kesepakatan sebagai upaya

mengatasi organisasi-organisasi gerakan separatis.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam mengatasi organisasi-organisasi gerakan separatis ternyata masih belum efektif dan belum mencapai hasil signifikan. Hal ini ditandai dengan masih adanya organisasi-organisasi gerakan separatis hingga saat ini. Mereka akan terus melakukan perlawanan sampai pemerintah memberikan otonomi khusus, bahkan memberikan kemerdekaan. Pemerintah rupanya harus bekerja ekstra keras untuk merumuskan upaya yang tepat agar gerakan separatis dapat teratasi.

Organisasi-organisasi yang terlibat dalam Konflik Thailand Selatan

Terdapat beberapa aktor penting yang telah terlibat dalam konflik di Thailand Selatan. Aktor negara yang utama sudah pastilah melibatkan Thailand terdiri dari pada organisasi-organisasi gerakan separatis seperti, Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP), Barisan Revolusi Nasional atau *People National Front* (BRN) dan Pertubuhan Pembebasan Bersatu Pattani atau *Pattani United Liberation Organization* (PULO)

Oleh itu, organisasi-organisasi gerakan separatis yang dinamakan sebagai BNPP, BRN dan PULO pada tahun 1960an. Tujuan utama ditubuhkan adalah untuk berjuang demi kemerdekaan daerah-daerah Pattani, Narathiwat dan Yala dari pada negara Thailand. BNPP, BRN dan PULO merupakan sebuah organisasi perjuangan yang bersenjata dan menuding bahwa kemerdekaan sepatutnya milik mereka.

Gerakan separatis sebagai salah satu upaya mempertahankan identitas nilai keagamaan dan etnisitas mereka dengan menuntut dihentikannya sikap diskriminatif kerajaan Thai. Upaya kongkrit yang dilakukan dengan berusaha mendorong masyarakat menjadi lebih maju. Identitas lama yang masih dibayang-bayangi kejayaan Patani sebagai sebuah kerajaan besar mulai menunjukkan perubahan dengan diajukannya hak-hak otonomi mereka dalam masyarakat berbangsa yang lebih besar. Penyebab karena Patani dianggap

sebagai golongan minoritas dan daerah taklukan kerajaan *Siam*, untuk itu masyarakat Patani tetap berupaya mempertahankan hak-hak otonomi dan identitas sosial mereka sebagai masyarakat dengan nilai-nilai ke-Islaman yang dianut oleh sebagian besar masyarakat.

Konflik ini yang telah berlangsung sepanjang lebih 56 tahun yaitu sejak tahun 1960 sehingga sekarang, telah menyaksikan partisipasi pelbagai pemimpin-pemimpin Thailand seperti Anand Panyarachun, Surayud Chulanont, Thaksin Shinawatra dan Samak Sundaravej. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa puncak awal kepada konflik yang melanda Thailand Selatan adalah akibat diskriminasi yang dijalankan terhadap populasi etnis Melayu-Islam dan tindakan pihak kerajaan Thailand yang beragama Buddha yang ingin memaksa proses asimilasi rakyatnya yang telah berlangsung selama hampir seabad lamanya. Selain itu, perkembangan teknologi yang canggih dan ledakan teknologi maklumat secara tidak disadarkan telah menyebabkan konflik ini menjadi lebih sengit.

Tiga organisasi utama sebagai wadah perjuangan kaum Melayu Patani, Ketiganya sama-sama berjuang (diwajibkan) untuk semua Melayu Patani dan untuk membebaskan diri dari negara Thailand. Merdeka menjadi tuntutan dan target tertinggi karena hanya dengan kemerdekaan tujuan melayani rakyat dapat tercapai. "Jihad untuk kemerdekaan adalah Fardhu'ain untuk seluruh laki-laki dan perempuan di negara Patani Darussalam yang dikacaukan, dijajah, ditindas dan rampas". Hal tersebut adalah landasan teologis bagi para aktivis gerakan separatis.

Penutup

Beberapa kesimpulan tentang dinamika bernegara masyarakat muslim Thailand Selatan dalam perspektif Sosiologi Politik Islam adalah: 1. Krisis Thailand Selatan adalah konflik sengit yang terjadi di tiga provinsi Selatan, Konflik ini terjadi antara pemerintahan Thailand melawan organisasi-organisasi separatis bersenjata di Thailand Selatan. Organisasi-organisasi separatis yang paling dominan dan popular dalam konflik ini

adalah BNPP, BRN, PULO, kelompok yang bercita-cita mendirikan negara merdeka "Patani Darussalam" diwilayah Thailand Selatan. Secara garis besar, konflik yang terjadi di Thailand Selatan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya a. Faktor historis yang diawali sejarah kejatuhan kerajaan Melayu Patani. Dengan kejatuhan itu, maka terhapus hak pertuanan orang-orang Melayu atas negeri Patani Darussalam dan Penggabungan daerah Patani ke dalam sistem administrasi Thailand pada tahun 1902. Pemerintah Thailand menghapuskan Syariah (Hukum Islam) dan adat Melayu (hukum adat Melayu) dan dengan perjanjian Anglo-Siam pada tahun 1909 di Bangkok yang pada saat itu mendapat penolakan orang-orang melayu penduduk setempat terutama Patani dan Setun yang ingin mempertahankan pemerintahannya sebagai kerajaan Islam. Oleh karena itu munculah respon dalam bentuk perlawanan dari pihak masyarakat Melayu Patani yang dipimpin oleh Tengku Abul qadir Kamarudeen dalam upaya untuk mempertahankan identitas Melayu Patani dari cengkaman penjajah *Siam*.

Faktor agama, di mana masyarakat Patani merupakan penduduk muslim minoritas di Thailand yang merasakan adanya dampak diskriminasi dari pemerintah pusat, terutama dalam kebebasan beribadah dan mendirikan pendidikan-pendidikan Islam, sehingga munculah kelompok-kelompok yang merasa tidak puas dan ingin memisahkan Patani dari negara Thailand (Merdeka).

Faktor Politik dimana pemerintahan Thailand menggunakan strategi asimilator yang berlebihan kepada rakyatnya terutama yang tinggal di Patani, sehingga masyarakat Melayu yang tinggal di Patani merasa terancam identitasnya. Faktor lain yang berkaitan dengan politik, yakni adanya dominasi elit politik oleh etnis Thai terhadap etnik melayu Patani dalam pemerintahan baik lokal maupun nasional.

Faktor sosial, dimana dalam kehidupan bermasyarakat muslim Thailand yang minoritas mendapat julukan yang tidak enak di dengar seperti *kek* yang berarti tamu atau orang yang menumpang. Hal ini tentu menyinggung perasaan kaum

muslim yang sama-sama tinggal di Thailand dan merasakan perlakuan diskriminasi dalam pergaulan di tengah-tengah mayoritas budhist.

Upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Thailand dalam mengatasi konflik yang terjadi diantaranya: (1) Pertama upaya internal dengan terbentuknya Komisi Rekonsiliasi Nasional (*National Reconciliation Commission*) pada tahun 2004 yang mengantarkan dan memediasi perdamaian di Thailand Selatan dan undang-undang darurat militer yang hubungan dengan keamanan nasional dan pemerintah Thailand mengandalkan kekuatan militer untuk menghadapi organisasi - organisasi pemberontak di Thailand Selatan; dan (2) Kedua upaya eksternal Penandatanganan Kesepakatan Damai di Kuala Lumpur Malaysia 2013. Negara Malaysia yang menjadi tuan rumah dalam kesepakatan awal pembicaraan dialog nantinya berharap kesepakatan damai tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dan salah satu perkembangan penting dalam penyelesaian konflik dengan keterlibatan eksternal terjadi pada 21 September 2008 bertempat di Istana Bogor. Pemerintah Thailand berunding dengan pemberontak separatis dan menyatakan komitmen mereka untuk mengakhiri konflik. Indonesia sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian konflik Thailand Selatan yang setelah melalui berbagai pertimbangan, Indonesia akhirnya menyanggupi menjadi mediator konflik tersebut.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 2000.
- Abdullah, Taufik dan Sharon, Siddique, *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta:LP3ES, 1989.
- Ali, Abu Arrimi, *Prawatsatr Khun NangMuslim Siam*, Bangkok: The Islamic Center, 2004.
- A.Malek, M.zamberi, *Patani dalam Tamadun Melayu..*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.
- Aphornsuvan, Thanet, *History and Politics of the Muslim in Thailand*, Bangkok: Thammasat University, 2003.
- Artikel tentang Ilmu Pengatahuan Umum, Teknologi dan daftar top 10 di dunia ini, estimasi juli, 2014.
- Asra, Nick, *Cak Siam Su Thailand Karn Plian Pleang Prathes Samai Compol Phibul Songkram*, Bangkok: Kau Reak, 2011.
- Aziz bin yaacob, Che mohd, *Konflik Pemisah di Selatan Thailand: Isu, Aktor dan Penyelesaian*, Universiti Sains Malaysia, 2009.
- Craib, Ian, *Teori-teori Sosial Modern*, Jakarta: CV. Rajawali, 1992.
- Daud, Abdulrahman, *Sejarah Negara Fathoni Darussalam*, Teluban: tidak cantum cetakan dan tahun.
- Fathy al-Fatani, Ahmad, *Pengantar Sejarah Patani*, khotabaru, Kelantan: pustaka Darussalam, 1994.
- Hasbullah, Moeflich, *Asia Tenggara Konsentrasi Baru: Kebangkitan Islam Bandung: Fokus media*, 2003.
- H. Lauer, Robert, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Kementerian Kebudayaan Nasional, *Karn Serm Sarnng Watthanatham Prachatiptai Nai Sangkum Thai*, Bangkok: Kementerian Kebudayaan Nasional, 2009.
- Kettani, M. Ali, *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Lawang, Robert, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas terbuka 1994.
- Madami, Usaman, *Islam di Muang Thai Selatan Inkulturasi*

- Nilai-nilai Islam dalam Kebudayaan Melayu, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Mat Zim, Farid, *Minority Muslim di Thailand*, Selangor: Minda Bandar Baru Bangi, 1998.
- Malek, Mohd. Zambari, *Umat Islam Patani: Sejarah dan Politik*, Shah Alam: Hizbi, 1993.
- M. Poloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: CV. Rajawali, 2000.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Nasir, Nasrullah, Ms, *Teori-teori Sosiologi*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Nik Mahmud Nik Anuar, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954*, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Nurdi, Herry, *Perjuangan Muslim Patani Sejarah Panjang Penindasan dan Cita-cita Perdamaian di Patani Darussalam*, Kuala Lumpur: Alam Raya Enterprise SDN BHD, 2010.
- Omar Capakiya, Ahmad, *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di Selatan Thailand 1992-2002*, Kuala Lumpur: UKM, 2002.
- Pitsuwan, Surin, *Islam di Muangthai: Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*, Jakarta : LP3ES, 1989.
- Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- R.Soharf, Betty, *Kajian Sosiologi Agama*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.
- Ritzer, George dan J. Goodman Douglas, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ruthven Malise, Azim Nanji, *Historical Atlas of Islam*, Massachu Setts: Harvard University Press Cambridge, 2004.
- Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada

- Media Group, 2011.
- Sjadzali, Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun*, Jakarta: Para Madina, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sumber data: Pusat Arahan Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan, Provinsi Yala, 2016 M.
- Supriadi, Dedi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan r&d*, Bandung: Alfabeta, cv.
- Tangsupvattana, Aek, Ora-orn Poocharoen, *Problem of the Three Southern Border Provinces: Policy Recommendation*, Bangkok: Chulalongkorn University, 2009.
- Thohir, Mujahirin, *Orang Islam Jawa Pesisiran*, Semarang: Fasindo Press, 2006.
- Umar Capakiya, Ahmad, *Politik dan Perjuangan Masyarakat Islam di Selatan Thailand*, Bangi: University Kebangsaan Malaysia, 2002.
- <http://dangeroftp.atani.blogspot.co.id/2015/04/mengganti-uu-darurat-ke-pasal-44-bikin.html>
- <http://profil-sejarah.blogspot.co.id>. diakses tanggal 02 Februari 2016.
- <http://dokumen.tips/documents/identitas-primordial-konflik-thailand-patani.html> (02February 2016).
- <http://www.antara.co.id/arc/2008/9/21/konflik-thailand-selatan-kenapa-iusuf-kalla/> . Op Cit.
- <http://riaupos.co/1766-opini-perjuangan-muslim-pattanidithailandselatan.html#.VuayEplyfIU>